

**PERILAKU POLITIK ELIT STRUKTURAL MUHAMMADIYAH
DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPD RI PERIODE 2019-2024
DI KABUPATEN PANGKEP**

SAIFULLAH BONTO
Nomor Stambuk : 10564 01984 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik

Disusun dan Diajukan Oleh

SAIULLAH BONTO

Nomor Stambuk : 10564 01984 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

25/05/2021

1 sep
Sub. Alumni

Ry0071/IPM/2020

BON

P¹

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah
dalam Pemilihan Calon Anggota DPD RI Periode
2019-2024 di Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : Saifullah Bonto

Nomor Stambuk : 10564 01984 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Pembimbing I

Menyetujui :

Pembimbing II


Muh Amin Umar, S. Ag, M. Pd. I


A. Lunur Prianto, S. IP, M. Si

Mengetahui :

Dekan Fisip

Unismuh Makassar



Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

Fisip Unismuh Makassar


Dr. Nuryanti Mustari, S. IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor. 0172/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan pada hari Jum'at tanggal Tiga Puluh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.



1. Muh. Amin Umar, S. Ag., M. Pd. I (Ketua) (.....)
2. Hardianto Hawing, ST., M. A (.....)
3. Ahmad Taufik, S. IP, M. AP (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Saifullah Bonto

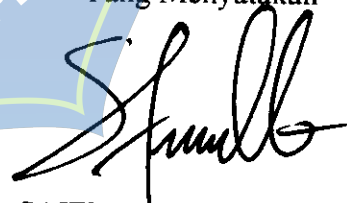
Nomor Stambuk : 10564 01984 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis atau di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar Akademik.

Makassar, 13 April 2021

Yang Menyatakan



SAIFULLAH BONTO

ABSTRAK

SAIFULLAH BONTO, 2021. *Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah dalam Pemilihan Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024 di Kabupaten Pangkep* (Dibimbing oleh Luhur Prianto dan Amin Umar).

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana perilaku politik elit struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep pada saat Pemilu 2019 terkhusus pada pemilihan Calon Anggota DPD RI. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 6 orang *key informan* dan 4 orang *secondary informan*.

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi, yaitu menekankan pada subyek aktivitas pengalaman hidup manusia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, triangulasi sumber, triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku politik yang ditunjukkan oleh masing-masing elit struktural Muhammadiyah Pangkep cenderung kepada perilaku politik yang moderat dan mengakomodir pendapat-pendapat dari pihak lain tanpa memperlihatkan fanatisme yang berlebihan. Indikator berikutnya adalah kecenderungan elit struktural Muhammadiyah yang tidak ingin terlibat langsung secara praktis dalam tahap pelaksanaan kampanye namun tetap mengarahkan anggota organisasi untuk memilih salah satu Calon Anggota DPD RI.

Kata Kunci : *Perilaku Politik, Elit, Muhammadiyah*

KATA PENGANTAR

Segala bentuk pujaan dan pujian hanya pantas kita panjatkan kepada Rabb yang menguasai alam semesta beserta isinya, Allah SWT. Salam serta sholawat takk lupa kita haturkan kepada *role model* kita dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah Muhammad SAWA. Semoga kita yang mengaku ummatnya bisa mendapat syafa'atnya di hari akhir kelak.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERILAKU POLITIK ELIT STRUKTURAL MUHAMMADIYAH DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPD RI PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN PANGKEP”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis begitu menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari segala bentuk bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak **Muh. Amin Umar, S. Ag, M. Pd. I** selaku Pembimbing I dan Bapak **A. Luhur Prianto, S. IP, M. Si** selaku Pembimbing II yang ditengah kesibukannya penulis tahu bahwa mereka sangat sibuk namun senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, penulis juga

menyampaikan terima kasih kepada motivator-motivator yang senantiasa memberikan semangat dan nasehat kepada penulis untuk tetap optimis menyelesaikan tugas akhir dan mengejar cita-cita. Juga terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Abdullah Dg Bonto dan Ibu Sahriah) dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S. IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bagi penulis, Beliau bukan hanya sebagai Ketua Jurusan namun penulis sudah menganggap Beliau sebagai orang tua sendiri di kampus.
4. Bapak Rudi Hardi, S. Sos., M. Si selaku Penasehat Akademik penulis yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan nasehat kepada penulis untuk segera mencapai gelar sarjana.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa memberikan ilmu dan arahannya untuk senantiasa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak H. Adnan Muis, S.H., M.H. selaku Ketua Umum IKA SMANSA Pangkep yang tak henti-hentinya memberikan nasehat kepemimpinan dan memotivasi penulis agar semangat dan fokus mencapai gelar sarjana.

7. Saudara-saudariku Dian Lestari, Arwan Rahman, Achmad Nur Hadid, Irfan, Ahmad Ardani dan guru organisasi penulis Nur Maulana Azis serta rekan-rekan seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di lembaga kemahasiswaan PIKOM IMM FISIP Unismuh, HIMJIP FISIP Unismuh, dan BEM FISIP Unismuh, yang selalu setia mengingatkan penulis agar senantiasa semangat dan fokus untuk mencapai gelar sarjana.
8. Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep dan Ortom Muhammadiyah Se-Kabupaten Pangkep yang senantiasa bekerja sama untuk memperoleh data demi kelancaran pengerjaan skripsi penulis.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 13 April 2021



SAIFULLAH BONTO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Konsep Perilaku Politik	10
1. Orientasi Politik	10
2. Sikap Politik	11
3. Perilaku Politik	14
4. Budaya Politik	18
B. Konsep Elit	20
C. Muhammadiyah	24
1. Elit Muhammadiyah	26
2. Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah	28
D. Kerangka Pikir	29
E. Fokus Penelitian	29
F. Deskripsi Fokus	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Keabsahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Profil Kabupaten Pangkep	40
B. General Perspektif (Keadaan Geografi Kabupaten Pangkep)	43
1. Letak dan Luas	43
2. Batas Wilayah	44
3. Topografi	44
4. Demografi	45
C. Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan	47
1. Proses Islamisasi	50
2. Gerakan Pembaharuan	52
3. Berdirinya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan	51
D. Sejarah Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep	54
E. Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep	56
1. Perilaku Moderat-Akomodatif	58
2. Perilaku Politik Idealis	65
3. Perilaku Politik Pragmatis	71
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebangkitan identitas tidak hanya merupakan praktik perjuangan berbasiskan identitas kelompok atas dasar etnik, agama, atau denominasi sosial-kultural lainnya. Dalam hal ini, kebangkitan identitas dimaknai dalam bentuk kesadaran dan mobilisasi atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya disembunyikan (*hidden*), ditekan (*suppressed*), atau diabaikan (*neglected*) oleh kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung untuk dan atas nama demokrasi yang lebih progresif. (Sparringa : 2005).

Di samping itu, kebangkitan identitas juga merupakan dampak perubahan identitas dalam proses interaksi antaretnik. Perubahan identitas merupakan wujud kedinamisan budaya, karena pada prinsipnya kebudayaan bukanlah suatu yang statis, melainkan mengalami perubahan secara evolusioner (Nursyam : 2011). Identitas bukanlah sesuatu yang permanen, tetap dan tidak bisa berubah. Identitas menjadi hal yang terbuka untuk ditafsirkan kembali, diubah dan dimanfaatkan dalam proses sosial (Ramstedt : 2011).

Peralihan dari era Orde Baru ke era Reformasi telah mengubah pandangan masyarakat Indonesia tentang identitas etnik dan agama. Kebangkitan identitas di era Reformasi dimaknai dengan munculnya identitas kedaerahan dan kesadaran politik baru untuk merestrukturisasi nilai-nilai

kearifan lokal atas dasar primordial etnis dan agama. Dalam ranah sosial budaya, kebangkitan identitas tercermin dari upaya memasukan nilai-nilai keetnisan ke dalam peraturan daerah, pemekaran wilayah berbasis etnis dan perjuangan untuk mendapatkan otonomi khusus. Sementara dalam konteks keagamaan, kebangkitan identitas terefleksi dalam aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk bermunculannya “perda syariah”, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu (Nordholt dan van Klinken : 2007).

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik.

Setiap warga negara harus memiliki kesadaran politik dan mampu memahami dunia politik dengan baik. Perilaku politik masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan sangat penting untuk mendukung proses kerja pemerintah dan pelaksanaan fungsi-fungsi birokrasi didalam menjalankan pemerintahan. Hal ini karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat. Maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik (Surbakti : 2010)

Semenjak demokrasi menjadi kebutuhan wajib negara, maka keterwakilan menjadi suatu proses wajib untuk menyampaikan aspirasi rakyat

sehingga pemerintahan diharapkan mampu dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat. Hal ini membuat lembaga legislatif mendapat peranan penting dan posisi strategis karena hanya wakil rakyat yang memiliki kemampuan mengungkapkan kehendak rakyat.

UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbang : (a) bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum disebut juga dengan "*political market*". Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk tatap muka atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program,

platform, asas, ideology serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilkannya dalam badan legislative maupun eksekutif. (Samego : 2009)

Salah satu perwakilan rakyat di parlemen adalah Dewan Perwakilan Daerah. Keberadaan DPD RI dalam desain bangunan ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk menjembatani aspirasi lokal kedaerahan dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian kepentingan dan aspirasi lokal dapat terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pusat. Bagaimanapun aspirasi kedaerahan harus tetap menjadi perhatian apalagi mengingat luasnya wilayah Indonesia dan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi dan berbagai ancaman disintegrasi atau pemisahan diri beberapa daerah yang menganggap tidak pernah diperhatikan aspirasi dan kesejahteraannya oleh pemerintah pusat. Intinya DPD diharapkan menjadi perekat yang akan memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi pertimbangan politis untuk melahirkan DPD.

Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia berkomitmen untuk lebih mengutamakan bidang dakwah, pendidikan dan kesejahteraan diwujudkan secara nyata dalam masyarakat, dan belum pernah berubah menjadi organisasi politik atau partai politik. Namun Muhammadiyah bukan berarti anti politik, tetapi Muhammadiyah senantiasa turut serta mewarnai dinamika perpolitikan

Indonesia melalui peran politik yang dimainkan oleh para elit Pimpinan Muhammadiyah. (Bosra : 2015)

Proses Pemilihan DPD sebagai manifestasi partisipasi politik menggunakan hak politik setiap warga dan elit Muhammadiyah, menimbulkan perilaku politik yang beragam. Keberagaman pilihan politik memunculkan efek antara kepentingan politik pribadi, warga dan elitnya. Kecenderungan menarik lembaga Muhammadiyah terjun langsung dalam politik atau tetap pada posisi sebagai gerakan Islam menjadi tarik ulur antara dua kepentingan tersebut. Sebagaimana dikutip (Suwarno : 2010) bahwa, "Perilaku politik Muhammadiyah, baik secara personal maupun kelembagaan sering terjadi tarik-ulur. Di satu segi menunjukkan kecenderungan terjun langsung dalam politik praktis dan di lain pihak, ingin tetap menjalankan fungsinya sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih kultural, bukan sebagai partai politik."

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam merupakan suatu organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah Islam, dengan orientasi gerakan pada pencerahan umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Dalam gerakan dakwahnya Muhammadiyah dikenal pula sebagai gerakan Islam yang mempunyai banyak wajah dalam arti netral, yang menunjukkan bahwa gerakan Islam modernis ini tidak dapat ditilik hanya dari satu sisi dengan satu wajah tetapi memerlukan pendekatan yang holistik. (PHIM : 2010)

Persinggungan Muhammadiyah dengan politik dapat ditelusuri antara lain melalui Studi mengenai Muhammadiyah dan politik dengan mengambil

fokus tentang perilaku politik elit Muhammadiyah, dengan pertimbangan bahwa: *Pertama*, Muhammadiyah melalui elit pimpinannya selama ini dikenal cukup luas serta banyak menempati posisi dan peranan yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Posisi dan peranan yang besar dari Muhammadiyah dapat dicermati dari keberadaan organisasi Islam ini yang menurut Peacock telah menjadi sebuah pergerakan Islam yang terkuat di Asia Tenggara. *Kedua*, melalui penelitian sosiologis dapat dijelaskan bagaimana kenyataan sosial Muhammadiyah yang tercermin dalam perilaku para elitnya menunjukkan koherensi atau inkonsistensi antara citra ideal dan ide kebajikan dengan dunia nyata yang boleh jadi berjalan ke arah lain sebagaimana suatu kelaziman dalam kehidupan sosial. (Maliki : 2005)

Sebagai ormas Islam yang terbesar di Indonesia Struktural Muhammadiyah berada pada level nasional hingga kelurahan/desa. Khususnya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dinaungi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pangkep. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pangkep sangat berperan dalam mengawal dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Terutama dalam kontestasi pemilihan umum. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Muhammadiyah Kabupaten Pangkep mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam mengarahkan warganya untuk menentukan sebuah keputusan pilihan politik.

Terkait dengan perilaku politik elit struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep juga sangat berpengaruh terhadap sikap politik yang akan diambil oleh warga Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep. Hal ini

dikarenakan sebagian besar warga Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep menunggu instruksi elit struktural Muhammadiyah. Hal inilah penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perilaku elit struktural politik Muhammadiyah dalam Pemilihan DPD RI khususnya di Kabupaten Pangkep.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) berjudul Perilaku Politik dan Elit dengan hasil lingkungan sosial politik tidak langsung yaitu dipengaruhi oleh partisipan politik yang memengaruhi cara pandang partisipan politik individu dalam menentukan pilihan politik.

Adapun pada penelitian lainnya, Sholikin (2018), Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah antara Pusat dan Daerah dengan hasil Kebijakan politik Muhammadiyah dalam menentukan sikap politiknya selalu menyesuaikan berbagai kondisi dimana kebijakan tersebut harus diambil, selain itu juga bagaimana konstelasi kekuatan elit kolektif kolegal Muhammadiyah didominasi oleh para elit yang memiliki pandangan politik seperti apa.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti perilaku politik elit struktural Muhammadiyah dengan beberapa pendekatan. Mengacu pada kerangka teori Putnam (2001) dengan membagi tiga model analisis elit, yakni analisis posisi, analisis reputasi dan analisis keputusan. Ketiga pendekatan tersebut merupakan suatu hal yang fenomenal dan menjadi perilaku elit dan menjadi dasar dalam menentukan tindakan politiknya. Sehingga pendekatan ini dapat menjelaskan perilaku politik elit struktural Muhammadiyah Kabupaten Pangkep dalam penelitian ini. Kemudian dalam penelitian ini juga ada

beberapa faktor yang menentukan yaitu partisipasi politik dan budaya politik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis fenomena politik melalui penelitian yang berjudul : Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah dalam Pemilihan Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024 di Kabupaten Pangkep.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah; Bagaimana perilaku politik elit struktural Muhammadiyah dalam Pemilihan Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024 di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tentang perilaku politik elit struktural Muhammadiyah dalam pemilihan Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk; Mengetahui bagaimana perilaku politik elit struktural Muhammadiyah dalam Pemilihan Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024 di Kabupaten Pangkep

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis, adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana perilaku elit politik struktural Muhammadiyah jika di kaitan dengan konsep dan teori elit politik. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam

pengembangan khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan Perilaku Politik ; Sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Pangkep, serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta pembelajaran bagi organisasi pemerintah maupun swasta.



mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki, dengan orientasi itu pula mereka menilai serta memertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik (Said dan Said : 2007).

Budaya demokrasi dalam suatu negara tidak bisa dikatakan berhasil apabila pemegang kekuasaan atau elit politik tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Hal penting lain yang harus diingat adalah bahwa demokrasi bukan hanya sekedar tata cara, prosedur, dan bukan juga sekedar mekanisme tata negara dalam pengelolaan sistem politik, melainkan isi, tingkah laku, komunikasi, interaksi, serta tata nilai (www.kompasiana.com, politik, diakses pada tanggal 26 Juni 2019).

2. Sikap Politik

Mengkaji tentang sikap politik (*political attitudes*) berarti mengkaji tentang pemikiran dan pandangan seseorang yang didasarkan pada pendirian mereka berupa pendapat atau keyakinan (KBBI, 1990). Karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana pemikiran dan pandangan politik elit Muhammadiyah dalam merespon dinamika seputar Islam dan politik. Dalam mengkategorisasikan sikap politik elit, digunakanlah tesis tarik-menarik antara dua kutub ekstrem, yaitu sikap inklusif dan sikap eksklusif. Sikap inklusif lebih mengedepankan substansi (bahkan lebih dari sekedar substansi) daripada simbol. Sedangkan sikap eksklusif lebih mengedepankan simbol daripada substansi. Dua kutub ekstrem inilah yang selalu mewarnai sikap politik di kalangan elit menengah Muslim di Indonesia. Model bentangan dua kutub ekstrem ini, juga

Ketiga, berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, serta tidak mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit. *Keempat*, para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar dan adil, serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah *fasad* (kerusakan) dan hanya mementingkan diri sendiri. *Kelima*, berpolitik dengan kesalehan, sikap positif dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi *amar ma'ruf dan nahi mungkar* yang tersistem dalam satu-kesatuan imamah yang kokoh. *Keenam*, menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik, yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa (PHIM : 2010).

Sikap politik tidak hanya bersifat tunggal Karena itu, sikap politik bisa gabungan, tidak hanya terdiri satu sikap saja. Kemudian, munculnya sikap politik yang beragam tersebut tidak bisa dilepaskan oleh faktor-faktor yang beragam (Jurdi : 2010)

Pertama, kategori latar belakang sosiologis. Secara sosiologis, latar belakang seseorang dapat diidentifikasi, antara lain berupa jenis kelamin, umur, pendidikan, asal daerah, suku bangsa, paham keagamaan, pekerjaan, pergaulan, pengalaman organisasi, orientasi hidup individu, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, latar belakang sosiologis difokuskan pada empat faktor yang akan menjadi kecenderungan utama dalam mempengaruhi

sikap-sikap politik mereka, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, relasi atau pergaulan, dan orientasi politik individu.

Kedua, kategori organisatoris. Secara terperinci, kategori organisatoris terbagi menjadi tiga faktor: (1) faktor budaya politik organisasi, yaitu pandangan dan sistem nilai yang terkait erat dengan setiap keputusan politis dan sudah berlaku di dalam sebuah organisasi (2) faktor kepentingan politik organisasi, yaitu tujuan dan target yang dikejar oleh sebuah organisasi dari hasil proses politik; (3) faktor kebijakan organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki keputusan resmi dalam menyikapi segala hal yang berimplikasi pada kehidupan manusia secara umum dan organisasinya secara khusus. Setiap keputusan yang dibuat tentu sudah mengalami proses pemufakatan di internal elit organisasi yang harus ditaati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut (Firmanzah : 2008).

3. Perilaku Politik

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap, tidak saja badan dan ucapan dan politik tetapi segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintah Negara tau Negara lain (KBBI:1998). Teori mengenai perilaku politik adalah bagian dari dasar pemikiran kaum behaviorisme yang memandang bahwa kehidupan politik tidak terlepas dari perilaku-perilaku politik yang menyertainya (Varma:2007)

Perilaku politik merupakan studi yang mempelajari tentang perilaku seseorang, secara lebih spesifik adalah actor politik, pemilih dan politisi. Perilaku politik memberikan beberapa pemahaman tentang hubungan antar

tindakan politik seorang warga Negara dan sebuah proses politik dalam suatu system demokrasi. Tujuan utama dari mengetahui tentang perilaku politik adalah untuk menjelaskan apakah perilaku seorang pemilih dapat dikatakan netral atau tidak (Kayode : 2013).

Perilaku politik adalah aktivitas yang memiliki interaksi dengan kegiatan politik. Interaksi antara masyarakat dan pemerintah, lembaga pemerintahan dan di antara individu dan kelompok dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik merupakan proses timbal balik dalam suatu negara antara pembuat keputusan dengan warga negara biasa yang bertindak sebagai pihak yang hanya dapat memengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Oleh karena itu, perilaku politik dibagi dua, yakni perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah dan perilaku politik warga negara biasa.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan. (Surbakti : 2010) Dengan demikian hal ini yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam penelitian ini.

Terdapat dua fungsi politik yang menjelaskan tentang siapa yang melakukan kegiatan politik individu ataukah struktur kelembagaan? Pendekatan kelembagaan dalam ilmu politik menyatakan bahwa lembaga (struktur) yang melakukan kegiatan politik sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut, sehingga yang perlu dipelajari bukan perilaku individu tetapi perilaku

lembaga-lembaga politik dan pemerintah. Sedangkan jika dilihat melalui pendekatan behaviorisme, bahwa individu lah yang secara actual melakukan kegiatan politik karena perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan kumpulan perilaku individu yang berpola tertentu (Surbakti : 2010)

Dalam pandangan kaum behaviorisme, pemahaman terhadap kehidupan politik tergantung pada pemahaman tingkah laku actor-aktor politik. Hal ini disebabkan karena individu dengan segala kecenderungan psikologis dan nilai-nilai budaya yang dianutnya memainkan peranan yang penting dalam menentukan tingkah laku individu. Pada umumnya pendekatan perilaku tidak hanya menjelaskan mengenai tingkah laku seseorang, melainkan juga orientasinya terhadap kegiatan tersebut seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan dan harapan. Berdasarkan anggapan perilaku politik hanya salah satu dari keseluruhan perilaku, maka pendekatan ini cenderung untuk bersifat interdisipliner (Yoyoh : 2015).

a. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik

Individu atau kelompok dalam perilaku politik tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang saling memiliki hubungan satu sama lain seperti latar belakang yang dapat mempengaruhi actor dalam mengambil keputusan politik ada empat. Pertama, lingkungan politik tidak langsung, seperti sistem politik dan sistem ekonomi. Kedua, lingkungan politik langsung yang membentuk kepribadian actor politik seperti keluarga, agama, pendidikan, sekolah dan kelompok pergaulan. Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu yang dipengaruhi

oleh tiga basis fungsional sikap yaitu kepnetingan, penyesuaian diri dan pertahanan diri. Keempat, lingkungan social politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi actor secara langsung ketika hendak melakukan kegiatan \, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya (Budiardjo : 2014).

b. Model Perilaku Politik

Dalam melakukan kajian terhadap pendekatan perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan analisis. Pertama, individu sebagai actor politik yaitu aktivis politik. Kedua, agregasi politik yaitu kelompok individu yang tergabung dalam suatu organisasi seperti partai politik, birokrasi dan lembaga-lembaga pemerintahan. Ketiga, tipologi kepribadian politik yaitu tipe-tipe kepribadian pemimpin seperti otoriter, demokratis dan leissfer. (Sastroatmodjo : 2005)

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah adalah suatu kegiatan dari warganegara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi (Sitepu : 2012).

Partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara

(*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict and conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (Damsar : 2012)

4. Budaya Politik

Perilaku manusia dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah perilaku politik, dipengaruhi oleh pola orientasi yang dimiliki dan proses belajar yang dialami oleh seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian, untuk memahami perilaku politik harus memahami kebudayaan politik masyarakatnya. Salah satu wujud budaya akan tercermin dalam pola hubungan yang terjadi antara individu (anggota kelompok) yang satu dengan yang lainnya, antara individu dengan kelompoknya, dan antara kelompok dengan kelompok. Pola hubungan dalam system politik masyarakat tertentu itu dinamakan budaya politik (Abdulkarim : 2015).

Menurut Almond dan Verba budaya politik adalah bagaimana seseorang memiliki orientasi, sikap, dan nilai-nilai politik yang tercermin dalam sikap dan perilaku politiknya. Pengertian budaya politik menunjuk kepada suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga Negara di dalam sistem itu (Almond, Verba : 1990).

Lebih lanjut menurut Almond dan Verba, warga Negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan symbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan, perilaku tokoh-tokoh politik, keputusan alat kebijakan yang

dihasilkan oleh sistem politik, serta bagaimana seharusnya ia berperan dalam sistem politik.

Dari sinilah akan dilihat pola orientasi dari tiap warga Negara terhadap sistem politik sebagai dasar penentuan klasifikasi tipe kebudayaan politik. Orientasi warga Negara tersebut meliputi aspek kognitif, afektif dan evaluative yang ditujukan kepada sistem politik secara umum, aspek-aspek input dan output, serta kepada sejumlah pribadi sebagai actor politik (Abdulkarim, 2015)

a. Tipologi Budaya Politik

Gabriel dan Almond dan Sidney Verba membagi budaya politik dalam tiga jenis. *Pertama*, budaya politik parochial yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan factor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relative rendah). *Kedua*, budaya politik kaula yaitu masyarakat bersangkutan sudah relative maju tetapi masih bersifat pasif. *Ketiga*, budaya politik pasrtisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi (Almond, Verba, 1990).

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parochial (parochial political culture) biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dalam peranan politik tingkat partisipasi politik rendah, orientasi kognitif dapat memengaruhi pandangan politik seseorang.

2. Budaya Politik Kaula

Budaya politik kaula memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluar (output) sangat rendah.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik dimana seseorang memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik dan administratif. Dengan demikian, perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipasi seseorang dianggap aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya.

B. Konsep Elit

Studi tentang elit dalam ilmu sosial termasuk bidang studi yang menarik dan menghimpun para pemikir dari pelbagai disiplin, kendati disadari bahwa teori elit memiliki kelemahan tertentu sebagaimana teori-teori sosial lainnya¹⁰. Studi tentang elit sebenarnya telah tumbuh sejak zaman Aristoteles, tetapi menjadi sebuah kajian ilmiah yang mendalam dimulai terutama sejak era Vilfredo Pareto (1848-1923), Gaetano Mosca (1858-1941) dan C. Wright Mills (1916-1962) ketika masing-masing membahas mengenai “*circulation of elites*”, “*the ruling class*” dan “*the power elite*”. Teori elit dibangun di atas pandangan atau

anggapan bahwa keberadaan elit, lebih-lebih elit politik, tidak dapat dielakkan dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks.

Istilah elit berasal dari bahasa Inggris *elite* yang juga berasal dari bahasa latin *eligere*, yang berarti memilih (Suzanne, 1995). Istilah elit digunakan pada abad ke 17 untuk menyebut barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus yang kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok sosial tinggi seperti kesatuan-kesatuan militer atau kalangan bangsawan (Bottomore, 1990).

Teori elit menegaskan bahwa setiap masyarakat terbagi menjadi dua kategori yang luas dan mencakup (Varma, 1995) :

- a. Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah
- b. Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah

Konsep dasar teori yang lahir di Eropa ini mengemukakan bahwa di kelompok penguasa (*the ruling class*), selain ada elit yang berkuasa (*the ruling elite*) juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika elit yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah.

Dalam pandangan Keller, studi tentang elit dapat memusatkan perhatian pada empat hal. *Pertama*, anatomi elit berkenaan dengan siapa, berapa banyak dan bagaimana para elit itu muncul. *Kedua*, fungsi elit berkenaan dengan apa tanggungjawab sosial elit. *Ketiga*, pembinaan elit menyangkut tentang siapa yang mendapatkan kesempatan menjadi elit, imbalan apa yang mereka terima dan kewajiban-kewajiban apa yang menunggu mereka dan *keempat*, keberlangsungan

(bertahannya) elit berkenaan dengan bagaimana dan kenapa para elit itu dapat bertahan serta bagaimana dan kenapa di antara mereka hancur atau tidak dapat bertahan.

Pembahasan tentang teori elit disini merujuk pada makna yang telah dikonsepsikan Robert Putnam, Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. Define elit menurut Robert Putnam adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain (Mohtar, Colin : 2000).

Menurut Pareto setiap masyarakat yang diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bias menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu yang merupakan terbaik. Mereka dikenal sebagai elit (Varma : 1995).

Menurut Mosca dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang dikuasai. Kelas penguasa jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan, sedangkan yang kedua, kelas yang jumlahnya lebih banyak (Bottomore : 1990)

Berdasarkan konsepsi Mosca dan Putnam, elit dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok sebagaimana yang dikemukakan oleh Pareto dan dikutip ulang oleh Bottomore. Pertama elit yang memerintah (*governing elite*), terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. Kedua, elit yang tak memerintah (*non governing elite*) yang mencakup sisanya.

Untuk menganalisa siapa yang berpengaruh besar dan yang berkuasa dalam membuat keputusan kolektif dalam suatu masyarakat, Putnam menggunakan tiga model yaitu analisis posisi, analisis reputasi dan analisis keputusan (Mohtar, Colin : 2000). Analisis posisional menempatkan elit sebagai kelompok yang berada pada posisi struktural organisasi, mereka itulah yang paling banyak member andil dalam proses pengambilan keputusan untuk masyarakat. Analisis reputasional memposisikan elit sebagai kelompok yang mempunyai pengaruh atas keputusan-keputusan suatu organisasi, sekalipun ia tidak berada dalam struktur organisasi atau dalam posisi informal dalam masyarakat.

Analisis keputusan memposisikan elit sebagai kelompok yang memiliki pengaruh dalam organisasi, sehingga ide-ide dan pemikirannya dapat dijadikan sumber atau preferensi bagi keputusan organisasi. Dengan kata lain elit diartikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif (Mohtar, Colin : 2000)

Posisi elit dalam wilayah yang politis yang memberikan pandangan dalam pengambilan kebijakan dalam sebuah organisasi. Elit merupakan sekelompok kecil orang dalam sebuah masyarakat atau organisasi yang memegang posisi dan peranan penting. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka keberadaan dan peranan elit tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses politik dan kekuasaan yang berlangsung dalam suatu masyarakat atau organisasi tempat dimana para elit tersebut tinggal.

Maka dalam studi tentang elit dengan fokus kajian pada masalah perilaku politik elit Muhammadiyah sebagaimana dikembangkan dalam kajian ini, dianalisis tentang pola perilaku politik elit Muhammadiyah dalam kaitan dengan faktor-faktor struktur (konfigurasi) kekuasaan elit, kebudayaan politik elit dan kepentingan-kepentingan elit dalam lingkungan kehidupan masyarakat di mana para elit itu berada.

C. Muhammadiyah

Muhammadiyah dapat dilihat dari dua segi, yaitu arti bahasa atau etimologis, dan arti istilah atau terminologis. Arti bahasa atau etimologis, Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab “Muhammad” yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Kemudian mendapatkan “ya’nisbiyah” yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umat “Muhammad saw” atau “pengikut Muhammad saw”, yaitu semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa nabi Muhammad saw. Adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Dengan demikian, siapa pun juga yang mengaku beragama Islam maka sesungguhnya mereka adalah orang Muhammadiyah tanpa harus dilihat dan dibatasi oleh adanya bedaan organisasi, golongan, bangsa, geografis, etnis dan sebagainya (HPTM : 2011)

Hal ini berarti bahwa sesungguhnya orang-orang yang ada di Jami’iyah, Nahdatul Ulama, Persis, PUI, al-Irsyad, al-Khairat, Jami’atul Wasliyah dan lainlainnya secara arti bahasa juga orang-orang Muhammadiyah, karena mereka itu adalah pengikut ajaran Nabi Muhammad saw. Arti istilah atau terminologis, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Dakwah amar Makruf Nahi Munkar,

berasas Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiyah (Pasha : 2000)

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam merupakan suatu organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah Islam, dengan orientasi gerakan pada pencerahan umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Dalam gerakan dakwahnya Muhammadiyah dikenal pula sebagai gerakan Islam yang mempunyai banyak wajah dalam arti netral, yang menunjukkan bahwa gerakan Islam modernis ini tidak dapat ditilik hanya dari satu sisi dengan satu wajah tetapi memerlukan pendekatan yang holistik (PHIM : 2010).

Sebagai gerakan pembaharuan keagamaan, Muhammadiyah tampil dalam gerakan pemurnian dengan memberantas syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat di kalangan ummat Islam. Sebagai agen perubahan sosial, ia melakukan modernisasi sosial dan pendidikan guna memberantas keterbelakangan umat Islam. Sebagai kekuatan politik, Muhammadiyah memerankan diri selaku kelompok kepentingan. Beberapa sisi dari wajah Muhammadiyah itu pada umumnya bermuara pada satu predikat yakni gerakan tajdid, gerakan pembaharu, gerakan reformis atau modernis (Alfian : 2010).

Meskipun Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, bukan sebagai organisasi politik. Namun demikian tidak berarti bahwa Muhammadiyah anti politik, karena bagaimana pun Muhammadiyah berkepentingan dengan politik untuk mendukung dan melancarkan gerakan dakwahnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan politik,

Muhammadiyah selalu berhati-hati dan bersikap lentur, dengan tetap menjaga komitmen untuk mengutamakan bidang dakwah, pendidikan dan kesejahteraan social (Alfian : 2010).

Pemikiran Muhammadiyah yang bersentuhan dengan demokrasi dituangkan dalam sifat-sifat Muhammadiyah yang tercantum pada rumusan kepribadian Muhammadiyah. Konsep kepribadian Muhammadiyah lahir pada era kepemimpinan H. M. Yunus Anis (1959-1962). Diputuskan dalam Mukhtar ke 35 di Jakarta tahun 1962, yang dikenal dengan Mukhtar Setengah Abad Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah merupakan konsep yang menyangkut sifat-sifat Muhammadiyah yang menekankan Muhammadiyah kembali meneguhkan jati dirinya sebagai gerakan dakwah Islam dan tidak terpengaruh dengan cara-cara partai politik (Manhaj Gerakan Muhammadiyah : 2010).

1. Elit Muhammadiyah

Dari beberapa corak perilaku politik Islam di Indonesia, khususnya pada masa Orde baru, dapat dicermati adanya varian kecenderungan seperti ditunjukkan oleh Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan sosial-keagamaan di Indonesia. Muhammadiyah dalam hal ini menunjukkan sikap politik yang akomodatif-realistik dari kalangan umat Islam lainnya. Sikap akomodatif-realistik ini merupakan cerminan dari Muhammadiyah yang memandang Islam sebagai bersifat totalistic mengenai kehidupan tetapi memilih pendekatan non-politik dan pendidikan dalam mencapai tujuan melahirkan suatu masyarakat Islam. Sikap politik yang akomodatifrealistik lebih diterima oleh kekuasaan dan merupakan masa depan yang dominan dari suatu simbiosis Islam dan penyesuaian-

penyesuaian diri dengan Demokrasi Pancasila di bawah hegemoni militer pada era Orde Baru itu.

Dengan demikian, di dalam komunitas elit muslim, termasuk di dalamnya elit Muhammadiyah terdapat heterogenitas pola orientasi politik-keagamaan yang menunjukkan orientasi perilaku politik keagamaan yang radikal, idealis, transformatif, akomodatif dan pragmatis dalam merespon dinamika kehidupan yang tumbuh baik di lingkungan intern umat Islam maupun dalam kancah kehidupan bangsa dan negara. Beragam corak perilaku politik-keagamaan tersebut terkait pula dengan dinamika kelompok di tubuh umat Islam yang memiliki corak faham dan basis sosial keagamaan yang heterogen.

Elit Muhammadiyah adalah orang-orang yang terkemuka yang menduduki posisi teratas secara formal dan berperan dalam menentukan kebijakan organisasi di lingkungan Muhammadiyah. Dengan mengikuti konsep-konsep dan analisis yang dikembangkan oleh para ahli teori elit, maka fokus analisis tentang elit Muhammadiyah dalam penelitian ini ialah analisis elit struktural, yakni elit yang berada dalam puncak struktur organisasi formal Muhammadiyah. Namun, karena kehidupan sosial dari elit Muhammadiyah itu dicari pula kaitannya dengan aspek reputasi dan pengambilan keputusan yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan komunitas elit Muhammadiyah.

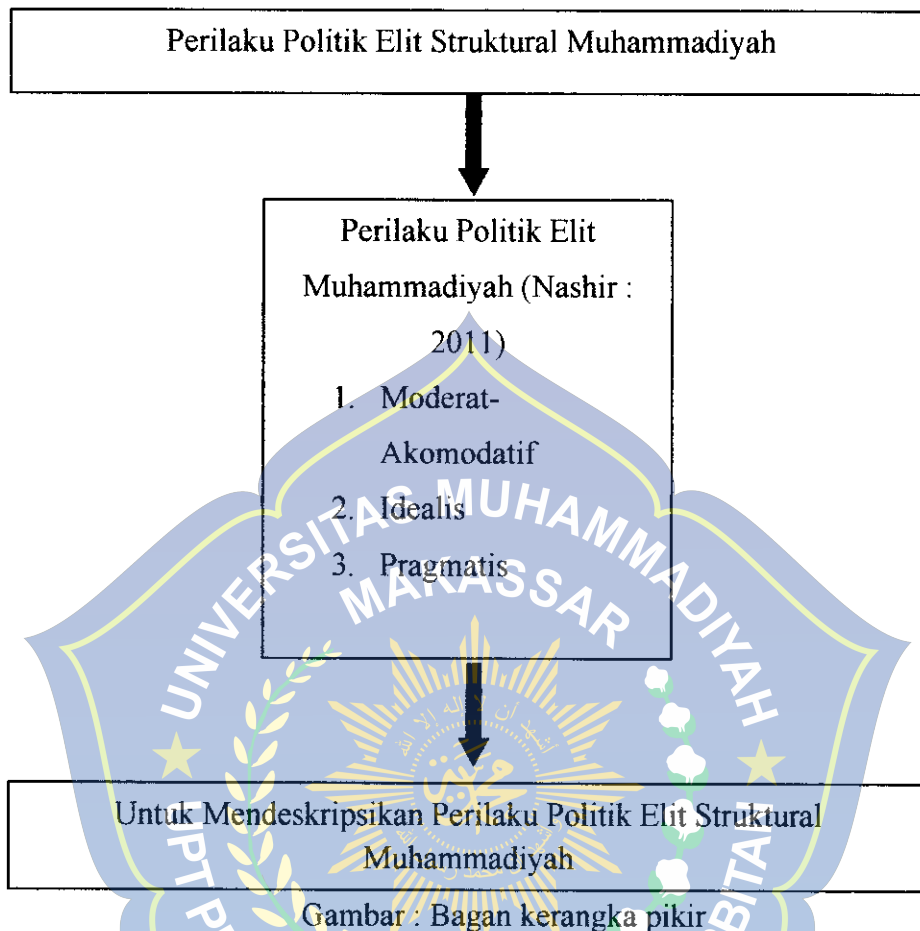
Elit yang menduduki posisi formal dan penting dalam struktur kepemimpinan dan organisasi Muhammadiyah yang dijadikan bahan studi ialah elit Muhammadiyah yang terdiri atas lima kelompok: *Pertama*, elit ulama/agama, yakni elit Muhammadiyah yang secara khusus memiliki bobot sebagai kyai atau

tokoh agama. *Kedua*, elit pengusaha/pedagang, yakni elit Muhammadiyah yang secara khusus memiliki pekerjaan utama sebagai pengusaha, pedagang. *Keempat*, elit birokrat/birokrasi, yakni elit Muhammadiyah yang secara khusus memiliki pekerjaan utama sebagai pegawai negeri. *Kelima*, elit swasta, yakni elit Muhammadiyah yang secara khusus memiliki pekerjaan utama sebagai pegawai atau karyawan swasta. *Keenam*, elit politisi, yakni elit Muhammadiyah secara khusus memiliki kedudukan dan peran sebagai aktivis politik di partai politik (Jinan : 2000).

2. Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah

Perilaku politik elit Muhammadiyah pada umumnya menunjukkan orientasi politik yang moderat-akomodatif (moderat akomodasionis). Pertama, pola perilaku politik moderat-akomodatif ditandai oleh (1) partisipasi politik dalam Pemilu dengan memilih organisasi politik tertentu tanpa fanatisme yang berlebihan, dan (2) kesediaan untuk bekerjasama dan menjalin hubungan secara luwes dan rasional dengan pemerintah, tanpa harus meleburkan diri. Selain pola perilaku moderat-akomodasionis, yang kedua muncul pola perilaku politik elit "idealis" cenderung mencita-citakan adanya sistem politik Islam, dan sangat menjaga jarak dari hubungan kepentingan dengan pemerintah, kendati tidak disertai dengan sikap konfrontasi. Pola ketiga ialah kelompok elit pragmatis, yang menunjukkan kecenderungan meleburkan diri dalam kepentingan politik dan birokrasi pemerintah (Nashir :2011).

D. Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan adalah bagaimana mengetahui perilaku elit politik Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep melalui teori perilaku politik menurut (Nashir, 2011) dimana ada 3 indikator yang dijadikan analisisnya yakni Perilaku Politik Moderat-Akomodatif, Perilaku Politik Idealis dan Perilaku Politik Pragmatis.

F. Deskripsi Fokus

1. Perilaku Politik Moderat-Akomodatif

Sikap politik kompromistik atau menyesuaikan diri dengan kekuasaan (pemerintah, negara) tetapi tidak dengan mengintegrasikan diri dalam kekuasaan selain terbatas pada kerjasama yang saling membutuhkan dengan tetap berpegang pada prinsip gerakan Muhammadiyah

2. Perilaku Politik Idealis

Sikap politik yang cenderung menarik garis batas dengan kekuasaan dan sampai batas tertentu menunjukkan sikap oposisi atau radikal terhadap kekuasaan.

3. Perilaku Politik Pragmatis

Sikap politik mengintegrasikan diri dalam kekuasaan itu dengan kecenderungan meninggalkan label ideologi Muhammadiyah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan setelah seminar proposal dilaksanakan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkep yang dimana dengan objek penelitian Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah dalam Pemilihan Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena banyaknya kantor-kantor Muhammadiyah baik ortom maupun sekolah beserta fungsionarisnya serta Amal Usaha Muhammadiyah yang ada di daerah ini. Alasan yang berikutnya adalah tingginya partisipasi pemilih di Kabupaten Pangkep. Untuk itu penulis ingin mengetahui perilaku politik elit struktural Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pangkep dalam proses pemilihan DPD RI.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku persepsi, motivasi dan lainnya secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah Fenomenologi merupakan sebuah penelitian yang mengamati tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia, dimana para peneliti berusaha masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kemudian di deskripsikan dalam bentuk tulisan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah proses mendapatkan dari subjek dan objek data. Data yang dimaksud digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Penggolongan ini dilakukan demi menjaga keakuratan dan relevansi serta kekayaan data yang diperoleh di lapangan sehubungan dengan objek penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan dari pihak pertama atau tangan pertama, tanpa melalui perantara. Data ini berkaitan langsung dengan informan. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek dan subjek yang diteliti. Sumber datanya melalui wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sebuah pihak ke dua, ketiga dan seterusnya. Misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengalihnya, seperti data dokumentasi, data wawancara dengan masyarakat, foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan sekunder (*secondary informan*). Informan kunci adalah mereka yang dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan informan sekunder dibutuhkan untuk melengkapi informasi data/data tentang objek penelitian guna memperkaya analisis, tetapi tidak mesti ada. Adapun informan dalam penelitian ini ialah :

No.	Jabatan Informan	Inisial Informan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pangkep b. Ketua Pimianan Daerah Aisyiyah Kabupaten Pangkep c. Ketua Nasyiyatul Aisyiyah Kabupaten Pangkep d. Ketua PD IPM Kabupaten Pangkep e. Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pangkep f. Ketua Umum PC IMM Pangkep	AMA SHF ST MR AKH AA	Unsur Muhammadiyah sebagai Pengurus Muhammadiyah Pangkep
2.	KPU Kabupaten Pangkep	RR	Perangkat Pemilu 2019 Kab. Pangkep
3.	Bawaslu Kabupaten Pangkep	MR	Perangkat Pemilu 2019 Kab. Pangkep
4.	Warga Muhammadiyah Pangkep	AA & MA	Unsur Muhammadiyah Pangkep
Jumlah			10 Informan

Sumber: informan diolah oleh Peneliti

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik ini berupa pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh keterangan berupa informasi, data dan fakta akurat yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik ini juga digunakan untuk mengetahui relevansi antara keterangan informan/responden dan data dengan kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan tetap mengontrol keabsahannya. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau masalah yang tampak pada objek penelitian. Pada saat peneliti melakukan observasi langsung yang terlihat dilapangan sangat jauh berbeda dengan dugaan awal, informan sangat mudah dijangkau namun kesulitan tetap dialami oleh peneliti sebab kesibukan masing-masing pekerjaan informan diluar dari pada struktural Muhammadiyah

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian dengan cara tanya jawab secara mendalam dan terbuka dengan bertatap muka langsung dengan informan/responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang

ditanyakan itu. peneliti sudah mewawancarai 7 informan yang telah dipilih untuk menjelaskan secara jelas dan terbuka perihal perilaku politik elit struktural Muhammadiyah dalam pemilihan DPD RI, informan memberikan penjelasan dan gambaran secara terperinci dan mendalam mengenai perilaku elit struktural Muhammadiyah dalam proses pemilihan DPD RI Periode 2019-2024

3. Studi kepustakaan (Dokumen)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, artikel, skripsi, hasil penelitian yang relevan, koran dan dokumen-dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah peneliti melakukan wawancara, Ketua PDM Muhammadiyah Kabupaten Pangkep memberikan data tambahan oleh peneliti berupa AD/ART Muhammadiyah dalam bentuk file, struktur organisasi Muhammadiyah Kabupaten Pangkep untuk menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam mengelola data adalah dengan cara menggunakan teknik analisis data hasil observasi dan wawancara. Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menyusun dengan menggunakan purposive sampling, artinya dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal Muhammadiyah yang ada di Kab. Pangkep sehingga mereka dapat memberikan informasi mengenai perilaku politik Elit struktural Muhammadiyah tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, namun analisis data yang dilakukan oleh peneliti lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Hubberman dan Milles dalam Sugiyono (2015), yaitu aktifitas dalam analisis data kualitatif peneliti lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas yang dilakukan peneliti dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya, reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan sampai pada laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas, bagan, hubungan antar indikator, tabel informan, gambar kerangka pikir. Dengan penyajian maka sangat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti. Dalam klasifikasi analisi ini, data disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Setelah data disajikan dan diolah oleh peneliti, maka akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu untuk diverifikasi. Pada tahap ini peneliti tidak meninggalkan selanjutnya, sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan tahap yang sebelumnya. Kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, agar kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat dipercaya.

G. Keabsahan Data

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan dan reduksi data. Teknik keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian di lapangan perlu data sebagai berikut :

1. Keikutsertaan peneliti di lapangan. Peneliti secara langsung ikut serta dalam proses penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dari responden sebagai bentuk kepercayaan kepada subjek bahwasannya data yang diteliti itu valid.
2. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan orang lain (pakar, ahli, dan kompeten) dalam melakukan pengecekan untuk perbandingan terhadap data. Triangulasi data yang digunakan ialah:

- a) Triangulasi data dengan sumber data, yaitu membandingkan data mengecek data dengan baik tingkat kepercayaan dan akurasi data yang diperoleh dari alat dan waktu yang berbeda.
- b) Triangulasi data dengan pakar/ahli/kompeten, untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data agar tidak terjadi bias dalam proses pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan cara sebagai berikut:
- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.
 - 2) Membandingkan pernyataan secara umum dan secara pribadi. Membandingkan pernyataan responden dalam proses penelitian dan sepanjang waktu.
 - 3) Triangulasi Waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Waktu yang dimaksud disini ialah adanya batasan yang dilakukan oleh peneliti baik waktu dalam segi jam dan hari yang dilakukan pada saat penelitian, bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Kabupaten Pangkep menjadi tempat atau lokasi penelitian.

A. Profil Kabupaten Pangkep

1. Sejarah Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Pangkajene. Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep. *Pangka* berarti cabang, dan *Je'ne* berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kota Pangkep yang membentuk cabang. Kata “Pangkajene” (Bahasa Makassar), berasal dari dua kata yang disatukan, yaitu “Pangka” yang berarti cabang dan “Je’ne” yang berarti air, dinamai demikian karena pada daerah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Barasa itu, terdapat sungai yang bercabang, yang sekarang dinamai Sungai Pangkajene. Sampai saat ini belum didapatkan keterangan yang tegas, sejak kapan nama “Pangkajene” menggantikan nama yang populer sebelumnya, ‘*Marana*’. Menurut beberapa sumber, awalnya yang dikenal adalah Kampung Marana, dan sungai yang membelah kota Pangkajene sekarang ini dulunya bernama Sungai Marana. (Makkulau, 2008).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Pangkajene dan Kepulauan belum bersatu dalam satu wilayah pemerintahan. Pangkajene dengan daratannya berstatus *Onderafdeeling* dengan nama *Onderafdeeling* Pangkajene dibawah taktis *Afdeeling* Makassar dengan 7 adat *gemenschap* yaitu : Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandalle dan Balocci. Onder Afdeeling Pangkajene waktu itu berada dibawah pengawasan seorang Gezaghebber setingkat Controleur yang berkedudukan di Pangkajene, sedang adat-adat *gemenschap* dipercayakan kepada karaeng-karaeng. Wilayah kepulauan sebagai bagian dari *Stadsgement* Makassar, dikepalai oleh Kepala Distrik Makassar yang wilayah meliputi : Pulau-pulau '*Spermonde*', terdiri dari 57 pulau, Kalu-kalukuang Group terdiri dari 8 pulau, *Postelion* dan *Paternoster* terdiri dari 52 pulau. Pulau-pulau tersebut disusun berkelompok disesuaikan jangkauan geografisnya serta diperintah oleh seorang *Gallarang*, yang statusnya sama dengan 'Kepala Kampung'. Di masa pemerintahan Jepang (1942 -1945), Sistem pemerintahan di Pangkajene tidak berubah, yang berubah hanyalah bahasa. Adat *gemeenschap* dinamai "*Gun*", dikepalai '*Guntjo*', dikoordinir oleh '*Guntjo Soda*' dari Indonesia dibawah taktis Bunken Kanrikan dari Jepang. Sedang pulau tetap dalam wilayah '*Stadsgement* Makassar' dengan penyebutan "*Makassar Si*", dikepalai '*Makassar Sitjo*' dan Distrik Makassar disebut "*Makassar Gun*", dikepalai "*Makassar Guntjo*".

Dengan Staatsblad 1946/17 Daerah-daerah bekas *Rechtstreeks Bestuursgebied* termasuk *Onderafdeeling* Pangkajene dibentuklah swapraja baru (*Neo Zelfsbestuur*), terdiri dari gabungan adat *gemenschap*. Wilayah kepulauan,

mulai dipisah dari Gemente Makassar dengan Ketua Dewan Hadat Abdul Rahim Dg Tuppu, mantan Kepala District Makassar dengan anggota hadat: Gallarang Balang Lompo, Gallarang Barrang lompo, Gallarang Sapuka, Gallarang Salemo, Gallarang Kalu-kalukuang, dan Gallarang Kodingareng.

UU No. 22 Tahun 1948 yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat RI tetap bertahan meski Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan SK Mendagri No. Des.1/14/4/1951, Gubernur diperintahkan mempersiapkan daerah otonom baru setingkat Daerah Swatantra Tingkat II, disusul PP No.34/1952, PP No.2/1952, dibentuklah Daerah Makassar yang berkedudukan di Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkajene dan Kepulauan sebagai Daerah Otonom Tingkat II. Akibat perkembangan kehidupan bernegara, lahir pula UU Darurat No.2 Tahun 1957, dimana Daerah Makassar dipecah menjadi Daerah : Gowa, Makassar, Jeneponto dan Takalar. Kabupaten Makassar membawahi wilayah-wilayah : (1) Onderafdeeling Pulau-Pulau ; (2) Onderafdeeling Maros ; (3) *Onderafdeeling* Pangkajene dengan pimpinan Bupati Kepala Daerah Andi Tjatjo. Usaha simplikasi pembentukan daerah – daerah dilanjutkan Pemerintah Pusat RI dengan UU No. 29 Tahun 1959, dimana Pangkep menjadi daerah otonom tingkat II, digabung dengan bekas *onderafdeling* pulau-pulau, sehingga menjadi Kabupaten Dati II Pangkep yang membawahi 9 kecamatan, yakni : Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Balocci, Segeri Mandalle, Liukang Tupabbiring, Liukang Kalmas, Liukang Tangaya dengan Bupati pertama, Mallarangeng Dg Matutu.

Kini, Kabupaten Pangkep tidak lagi terdiri dari 9 kecamatan, tapi 13 wilayah kecamatan. Sebagai bagian dari semangat Otonomi Daerah, maka lewat Perda No.13/2000 (Lembaran Daerah No. 18 Tahun 2000) telah dibentuk tiga kecamatan baru. Wilayah administrasi pemerintahan Pangkep saat ini meliputi Pangkajene, Balocci, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Liukang Tupabiring, Tupabbiring Utara, Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, Minasate'ne, Mandalle, dan Kecamatan Tondong Tallasa.

B. General Perspektif (Keadaan Geografi /Geographical Condition)

1. Letak dan Luas

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada 11.00' bujur timur, dan 040. 40'-080. 00' lintang selatan. Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 12.362,73 Km² (setelah diadakan analisis Bakosurtanal) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km², dengan daratan seluas 898,29 Km², dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu 250 Km², yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.112,29 Km², tetapi setelah diadakan analisis bersama Bakosurtanal, luas wilayah tersebut direvisi menjadi 12.362,73 Km² dengan luas wilayah daratan 898,29 km² dan wilayah laut 11.464,44 Km².

2. Batas wilayah

Batas administrasi, dan batas fisik Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara/*in the Northern side by* : Kabupaten Barru
- Sebelah Timur/*in the Eastern side by* : Kabupaten Bone
- Sebelah Barat/*in the Western side by* : Laut Jawa
- Sebelah Selatan/*in the Southern side by* : Kabupaten Maros

3. Topografi

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu:

1. Wilayah Daratan Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menembah pendapatan daerah.

Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari : Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle. Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas,

wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu:

- Kecamatan Liukang Tupabiring
- Kecamatan Liukang Tupabiring Utara
- Kecamatan Liukang Kalmas
- Kecamatan Liukang Tangaya

4. Demografi

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kotanya adalah Pangkajene. Kabupaten Pangkep awalnya memiliki luas wilayah 1.112,29 Km², setelah diadakan analisa bersama Bakosurtanas luas wilayah direvisi menjadi 12.362,73 Km² dengan luas wilayah daratan 898,29 Km² dan luas wilayah laut 11.464,44 Km². Jumlah penduduk Kabupaten Pangkep berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep tahun 2019 berjumlah 348.645 jiwa, terdiri dari laki-laki 170.474 jiwa dan perempuan 178.171 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kab. Pangkep

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
1	Liukang Tangaya	9.429	2,7	9.891	2,84	19.320	5,54
2	Liukang Kalmas	7.100	2,04	7.144	2,05	14.244	4,09
3	Tupabbiring	8.919	2,56	8.897	2,55	17.816	5,11
4	Pangkajene	23.858	0,84	24.789	7,11	48.647	13,95
5	Balocci	8.326	2,39	8.635	2,48	16.961	4,86
6	Bungoro	21.564	6,19	22.260	6,38	43.824	12,57
7	Labakkang	25.346	7,27	27.248	7,82	52.594	15,09
8	Ma'rang	16.921	4,85	17.780	5,1	34.701	9,95
9	Segeri	11.121	3,19	11.738	3,37	22.859	6,56
10	Minasate'ne	19.102	5,48	20.021	5,74	39.123	11,22
11	Mandalle	6.905	1,98	7.455	2,14	14.360	4,12
12	Tondong Tallasa	5.053	1,45	5.344	1,53	10.397	2,98
13	Tupabbiring Utara	6.830	1,96	6.969	2	13.799	3,96
JUMLAH		170.474	48,9	178.171	51,1	348.645	100

Sumber : Data Sekunder Disdukcapil Kabupaten Pangkep, 2019

C. Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan

Penulis sejarah Thomas W. Arnold menerangkan bahwa ketika Portugis pertama kali memasuki Sulawesi Selatan tahun 1540 M, mereka menemukan telah banyak orang Islam di Gowa ibukota Kerajaan Makassar. Pada masa raja Gowa ke-10 Tunipalangga (1546-1565), raja ini memberi izin kepada orang-orang Melayu untuk menetap di Mangalekana (Somba Opu). Raja Gowa ke-12 Tunijallo' telah mendirikan masjid bagi muslimin di tempat itu. Inilah masjid pertama yang di dirikan di negeri orang Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan. Para pedagang muslim itulah yang banyak memberi pengaruh kepada orang-orang Makassar memeluk Islam.

Islamisasi di Sulawesi Selatan selanjutnya dihubungkan dengan kedatangan dan peranan tiga orang ulama asal Minangkabau, secara khusus dikirim oleh Sultan dari Kerajaan Aceh. Ketiga ulama itu : Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datuk ri Bandang), Khatib Sulaiman (Datuk Patimang) dan Abdul Jawab Khatib Bungsu (Datuk Tiro). Untuk penyebaran Islam secara efektif, ketiga ulama itu memandang perlu menggunakan pengaruh Raja Luwu. Karena Luwu adalah kerajaan tertua dan rajanya masih memiliki kharisma di kalangan raja-raja. Salah satu tonggak sejarah dalam awal periode Islamisasi ini, bahwa raja yang mula-mula memeluk Islam di Sulawesi Selatan ialah Datu Luwu La Patiware' Daeng Parabbung, diberi gelar Sultan Muhammad, pada tanggal 13 Ramadhan 1013 H. (1603 M).

1. Proses Islamisasi

Ketiga ulama tersebut selanjutnya meminta kepada Raja Luwu petunjuk tentang upaya dakwah Islam di kerajaan lainnya. Datu Luwu memberi pertimbangan, bahwa sebaiknya beliau bertiga menghubungi kerajaan kembar : Gowa Tallo (Kerajaan Makassa). Kerajaan yang sangat terkenal sebagai yang terkuat memiliki supremasi politik di Sulawesi Selatan.

Ketiga ulama itu segera berangkat menuju Gowa Tallo. Tapi kemudian mereka sepakat untuk berpisah guna menunaikan dakwah Islam. Abdul Jawab Khatib Bungsu singgah di daerah Tiro (Bulukumba), beliau mengembangkan Islam dengan pendekatan tasawuf. Sulaiman Khatib Sulung, setelah tiba bersama Abdul Makmur Khatib Tunggal di Gowa, Sulaiman kembali lagi ke Luwu untuk mengajarkan agama Islam di sana dengan mengutamakan

keimanan (tauhid) serta mempergunakan konsep ketuhanan Dewata Seuwae yang telah berkembang sebelumnya sebagai metode pendekatan. Yang menetap di Gowa ialah Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datuk Ri Bandang). Abdul Makmur Khatib Tunggal berhasil mengislamkan raja Tallo I Malingkaan Daeng Manyonri dan Raja Gowa I Mangarangi Daeng Manrabia. Raja Tallo diberi gelar Sultan Abdullah Awwalul Islam, sedang Raja Gowa diberi gelar Sultan Alauddin. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada tanggal 9 Jumadil Awal 1015 H bertepatan dengan tanggal 22 September 1605 M, pada malam Jumat.

Kerajaan Tallo dan kerajaan Gowa adalah kerajaan kembar, lazim disebut Kerajaan Makassar saja. Dua tahun kemudian, seluruh rakyat Gowa dan Tallo dinyatakan memeluk Islam. Dilaksanakan dengan upacara shalat Jumat bersama yang pertama di masjid Tallo pada tanggal 9 November 1607. Kerajaan Makassar dengan resmi memproklamirkan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Dengan demikian Makassar adalah kerajaan Islam yang pertama di Sulawesi Selatan. Pada masa sebelum datangnya Islam, ada suatu konvensi raja-raja Bugis dengan raja Makassar, suatu *paseng* (Ikrar) bahwa siapa di antara mereka menemukan jalan yang lebih baik maka hendaklah di antara mereka menemukan jalan yang lebih baik maka hendaklah menyampaikannya kepada yang lainnya. Sebab itu Makassar mendapat kehormatan sejarah untuk menjadi pusat dakwah Islam di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17.

Atas dasar *paseng* itu, Sultan Alauddin mengirim utusan kepada segenap raja-raja di seluruh Sulawesi Selatan. Beberapa kerajaan kecil menerima seruan Islam itu dengan baik dan sebagiannya menolak, karena curiga tentang kemungkinan adanya tujuan-tujuan politis dari raja Gowa Tallo. Termasuk yang menolak ialah raja-raja : Bone, Wajo dan Soppeng dikenal dengan Tellumpoccoe, tiga serangkai yang besar. Akibatnya kerajaan Makassar mengangkat senjata menghadapi mereka, terkenal dalam sejarah Bugis sebagai peperangan Islam (*musu sellengnge*), selama empat tahun Sulawesi Selatan berhasil diislamkan secara resmi sampai kepada Toraja.

Berturut-turut menerima Islam : Kerajaan Sidenreng dan Rappang tahun 1608, Kerajaan Soppeng tahun 1609, kerajaan Wajo tahun 1610 dan kerajaan Bone tahun 1611. Raja Wajo Lasangkuru Mulajaji ketika akan menerima Islam mengajukan syarat dan disepakati oleh raja Gowa : “Tenna reddu muiwesseku, tenna timpa salewoku, tenna sesse balaori tampukku”. Artinya, tidak merampas kerajaanku, tidak mengambil harta rakyatku dan tidak mengambil barang-barang milikku.

Selanjutnya Islam menanamkan terus pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, sehingga adat dan agama menyatu dalam sistem nilai dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Islam telah menjadi jiwa pertahanan rakyat, sehingga daerah ini termasuk paling akhir dijamah oleh Belanda. Suatu bukti, bahwa barulah pada tahun 1905 Kerajaan Sidenreng dan Rappang di bawah Addatuang La Sadapotto menyerah setelah melalui peperangan seru yang meninggalkan banyak korban, karena rakyat tidak mau dijajah oleh orang kafir.

Adanya penganut agama Nasrani di daerah ini, karena agama itu terbawa oleh penjajah Belanda. Jumlahnya pun relative sedikit, tidak terdapat pada suku Makassar, Bugis dan Mandar sebagai suku terbesar Sulawesi Selatan.

2. Gerakan Pembaharuan

Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 M oleh K. H. Ahmad Dahlan segera mendapat sambutan meluas di nusantara ini. Di Yogyakarta, organisasi ini lahir memelopori gerakan pembaharuan (tajdid) yaitu upaya mengembalikan dan memimpin ummat kepada ajaran-ajaran Islam yang asli murni berdasar Al Qur'an dan Ash Sunnah yang Shahih. Hanya dalam waktu tiga belas tahun lebih, sesudah berdirinya Muhammadiyah, daerah Sulawesi Selatan mendapat rahmat dengan masuknya Muhammadiyah di daerah ini. Dalam kurun waktu yang cukup lama, sejak masa awal.

Islamisasi di Sulawesi Selatan, menyatunya ajaran-ajaran agama dengan adat istiadat daerah, berkembangnya ajaran-ajaran tarekat yang menyesatkan dengan memakai label Islam, menyusul penjajahan Belanda yang mengeksploitasi rakyat sambil membawa agama Nasrani, semua membawa permasalahan bagi umat Islam. Mereka banyak tergelincir dalam perbuatan syirik, khurafat dan bid'ah; tapi tidak disadarinya sebab kejahilannya terhadap Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Di samping itu tiadanya bimbingan metode menghadapi gerakan nasrani dan penjajah. Maka masuknya Muhammadiyah sebagai momen yang amat tepat bagi daerah ini. Muhammadiyah dengan gerakan tablighnya, gerakan pendidikannya, sekolah-

sekolah yang dibangunnya, penyantunannya terhadap kaum fakir miskin dan anak-anak yatim, pengaturan sistem zakat, pemantapan cara-cara beribadah sesuai dengan sunnah Rasul, segera memberi wajah baru bagi ummat Islam Sulawesi Selatan. Bagi kaum muda, lembaga kepanduan HW (Hizbul Wathan) menjadi pesemaian tumbuhnya pemimpin-pemimpin umat dan pejuang-pejuang bangsa. Mayoritas pemimpin dan pejuang kemerdekaan adalah hasil binaan Hizbul Wathan Muhammadiyah. Para syuhada yang gugur dalam revolusi fisik, banyak pula berasal dari kepanduan ini. Maka sejarah dan profil Sulawesi Selatan dewasa ini, gerakan pembaharuan Muhammadiyah banyak menyumbangkan andilnya.

3. Berdirinya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan

Muhammadiyah masuk di Sulawesi Selatan adalah atas inisiatif Mansyur Al Yamani. Ia mengundang beberapa orang berkumpul di rumah H. Yusuf Dg. Mattiro di Batong (sekarang pangkalan Soekarno). Pertemuan pertama ini dihadiri oleh 15 orang. Mansyur Al Yamani menjelaskan tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, khususnya tentang azas dan tujuan organisasi ini. Ketua PP Muhammadiyah waktu itu ialah K.H. Ibrahim (periode 1923-1932).

Sebagai hasil musyawarah dalam pertemuan itu, disepakati mendirikan Muhammadiyah saat itu juga, pertemuan pada malam Ahad tanggal 15 Ramadhan 1346 H / 30 Maret 1926 M. Saat inilah dicatat sebagai momen historis berdirinya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Disusun pula pengurus

Muhammadiyah yang terdiri dari mereka yang bermusyawarah waktu itu, sebagai berikut :

Ketua : H. Yusuf Dg. Mattirodan
 Wakil Ketua : K.H. Abdullah.
 Sekretaris I : H. Nuruddin Dg. Magassing
 Sekretaris II : Daeng Mandja
 Bendahara : H. Yahya.

Pembantu-pembantu berdirinya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yakni Mansyur Al Yamani, H. A. Sewang Dg. Muntu, G. M. Saleh, H. Abd. Karim Dg. Tunru, Osman Tuwe, Daeng Minggu dan Abd. Rahman. Pada malam itu juga Pengurus menulis surat pemberitahuan ke PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Kurang lebih 15 hari, datanglah surat balasan pengakuan Pimpinan Pusat (*Hoofdbestuur*) atas berdirinya dengan istilah “Grup Muhammadiyah Makassar”.

Kemudian Mansyur Al Yamani di utus ke Yogyakarta mengundang Pimpinan Pusat, H.M. Yunus Anis selaku Wakil Pimpinan Pusat di Yogyakarta datang ke Makassar pada bulan Juli 1926, mengadakan pertemuan terbuka (*openhare vergadering*) yang dihadiri oleh sekitar seribu pengunjung, menjelaskan tentang dasar dan tujuan gerakan pembaharuan ini. Sesudahnya, mengalirlah masyarakat memohon menjadi anggota Muhammadiyah. Di penghujung tahun 1926, “Gerup Muhammadiyah Makassar” disahkan menjadi “Cabang Muhammadiyah Makassar”. K.H. Abdullah dan Mansyur Al Yamani,

dua tokoh yang selanjutnya memimpin gerakan Muhammadiyah memasyarakatkan cita-citanya.

Maka di awal tahun 1927 Muhammadiyah mulai melangkah keluar kota Makassar. Berturut-turut daerah yang menerima Muhammadiyah: Pangkajene-Maros, Sengkang, Bantaeng, Labbakang, Belawa, Majene, Balangnipa Mandar. Pada tahun 1928 Muhammadiyah memasuki daerah-daerah : Rappang, Pinrang, Palopo, Kajang, Maros, Soppeng Riaja, Takkalasi, Lampoko, Ele (Tanete), Takkalala dan Balangnipa Sinjai. Di bawah kepemimpinan K. H. Abdullah dan Mansyur Al Yamani, dengan Sekretaris H. Nuruddin Dg. Magassing; K.H. Abdullah yang pernah belajar di Makkah selama 10 tahun, bekerja keras mengembangkan Muhammadiyah, menambah anggota, memberantas kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tahayul. Memimpin pendirian masjid dan mushalla, sekolah-sekolah dan rumah-rumah pemeliharaan anak yatim. Diselenggarakannya berbagai pengajian dan pertemuan tabligh di tempat-tempat umum. Demikian pula gerakan yang sama diselenggarakan oleh Aisyiyah selaku Muhammadiyah bagian perempuan.

Gerakan Dakwah itu berjalan terus walaupun selalu diawasi keras oleh P.I.D., Polisi Hindia Belanda. Menjelang Muktamar (kongres) ke-21, praktis seluruh daerah di Sulawesi Selatan telah berdiri Persyarikatan Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah ke-21 pada tanggal 1 Mei 1932 dapat dilangsungkan Muktamar, dihadiri oleh utusan-utusan dari seluruh Indonesia. Kemudian kota ini mendapat kehormatan untuk kedua kalinya, Muktamar

Muhammadiyah ke-38 pada tanggal 1-6 Syaban 1391 H atau 21-26 September 1971. Kota Makassar, juga disebut Ujung Pandang dewasa ini.

Sifat perkembangan Muhammadiyah sejak masuknya sampai khususnya pada Mukhtar ke-38, mirip dengan perkembangan Islam di awal perkembangannya di Sulawesi Selatan, yaitu berkembang dengan persuasif pada masyarakat, dipelopori oleh kaum ulama dan hartawan dari sata yang sama yakni bangsawan. Hanya saja kelebihan berkembangnya Islam, masuknya keterlibatan langsung para penguasa (raja-raja).

D. Sejarah Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep

Muhammadiyah masuk di Kab. Pangkep pada tahun 1927 dibawa oleh Haji Andi Sewang Dg Muntu. Seorang bangsawan yang berpengaruh di wilayah Pangkajene Kepulauan pada waktu itu. Lahir di Kampung Baruwa, Takalar pada tahun 1905, ia hijrah ke Labakkang, Pangkep dalam usia enam tahun mengikuti orang tuanya yang pindah. Di Labakkang inilah ia menyelesaikan pendidikan formalnya hingga *volkschool*. Setelah tamat, ia melanjutkan sekolah di *Vervolgschool* di Pangkajene. Setelah itu, ia merantau ke Sumatera Barat oleh pemerintah kolonial Belanda, karena dituduh terlibat dalam suatu usaha pemberontakan menentang penjajahan Belanda.

Di Sumatera Barat, Daeng Muntu melanjutkan pendidikannya di Sumatera Thawalib hingga tingkat Tsanawiyah. Dan melalui belajar di tempat tersebutlah, Daeng Muntu mengenal gerakan pembaharuan Islam hingga pada tahun 1927, ia pulang ke Labakkang setelah pendidikannya selesai.

Setibanya di Labakkang, Daeng Muntu dipertemukan dengan Muhammadiyah, sehingga dari sinilah sebagai orang yang telah mengenal gerakan pembaharuan, maka ia dengan mudah menerima faham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Ia pun mulai berinisiatif untuk turut mengembangkan faham dan gerakan itu dengan mengajak teman-temannya untuk memelopori berdirinya organisasi Muhammadiyah di Labakkang. Keinginan Andi Sewang Daeng Muntu untuk mendirikan sebuah organisasi akhirnya menjadi kenyataan pada tanggal 9 Oktober 1927, melalui suatu pertemuan umum, Muhammadiyah Ranting Labakkang diresmikan dan Haji Andi Sewang Daeng Muntu langsung dipercayakan sebagai ketua pertama. Dalam kepemimpinan awal Muhammadiyah Ranting Labakkang ini, Andi Sewang Daeng Muntu didampingi banyak para haji. Selain Haji Andi Sewang Daeng Muntu sendiri, ada Haji Muhammad Daeng Nojeng, Haji Masyhud, dan Haji Baso Daeng Bombong. Selain itu duduk pula seorang keturunan Arab, yaitu Sayyid Hamid.

Sebagai langkah awal berdiri, Muhammadiyah Ranting Labakkang mengadakan tabligh dengan mendatangkan muballigh dari Makassar serta mendirikan Amal Usaha Madrasah Diniyah. Untuk memperkuat sekolah yang didirikan itu, hingga tahun 1934 Muhammadiyah Ranting Labakkang telah mendatangkan empat guru dari Jawa. Selain itu Haji Andi Sewang Daeng Muntu bersama pemuka-pemuka umat Islam di Pangkajene, seperti Haji Muhadi, Haji Abdul Hamid dan Haji Parumpa juga berhasil membentuk Muhammadiyah Ranting Pangkajene, Muhammadiyah Ranting Bonto-Bonto,

Muhammadiyah Ranting Segeri dan Muhammadiyah Ranting Ujungloe. Akhirnya ranting-ranting inilah yang menjadi penguatan bagi Muhammadiyah dalam melebarkan kiprahnya dan berkembang selanjutnya hingga Muhammadiyah Pangkep berdiri sebagai pimpinan Daerah yang menaungi ranting-ranting dan cabang yang telah ada (Bosra : 2015).

E. Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep

Dewan Perwakilan Daerah menjadi representatif setiap daerah bersama DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di setiap daerah yang diwakilinya sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2017. Oleh karenanya dalam Pemilu 2019 menjadi pucuk perjuangan untuk meloloskan orang yang dinilai mampu untuk mewakili masing-masing daerahnya. Organisasi Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pangkep yang turut menjadi bagian dari terlaksananya Pemilu 2019 ini, tidak terlepas dari berbagai dinamika khususnya dalam Pemilihan Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024. Hal ini dikarenakan adanya rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel untuk mendukung Muhammad Syaiful Saleh menjadi senator DPD RI Periode 2019-2024.

Hasil rekapitulasi Pemilu 2019 untuk DPD RI Dapil Sulsel menyatakan Muhammad Syaiful Saleh belum memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota DPD RI Periode 2019-2024 dikarenakan hasil perolehan suara yang didapatkan tidak cukup banyak. Khusus untuk Kabupaten Pangkep, Muhammad Syaiful Saleh hanya memperoleh sebanyak 9.062 suara. Tidak jauh berbeda dengan pesaingnya yang juga memperebutkan simpati warga

Muhammadiyah yakni Muhammad Iqbal Parewangi dengan perolehan 7.013 suara. Perolehan suara terbanyak diduduki oleh Tamsil Linrung yang juga berhasil meraih kursi DPD RI Periode 2019-2024 dengan perolehan suara 56.982 suara di Kabupaten Pangkep.

Berikut tabel hasil rekapitulasi Pemilu 2019 sesuai dengan yang termuat di website KPUD Kabupaten Pangkep :

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Pemilu 2019

Nama Calon Anggota DPD	A M Iqbal Parewangi	Muhammad Syaiful Saleh	Tamsil Linrung
Liukang Tangaya	247	184	352
Liukang Kalmas	164	269	1.439
Liukang Tangaya	334	638	828
Pangkajene	1.294	1.757	10.558
Balocci	231	904	2.998
Bungoro	1.239	918	7.875
Labakkang	1.197	929	8.184
Marang	398	454	6.317
Segeri	247	280	4.987
Minasatene	1.109	1.158	6.299
Mandalle	187	223	4.443
Tondong Tallasa	186	1.178	1.474
Liukang Tupabbiring Utara	180	170	1.228
Jumlah Akhir	7.013	9.062	56.982

Sumber : Data Sekunder Website KPUD Kabupaten Pangkep, 2019

Untuk menganalisis perilaku politik elit struktural Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep, peneliti merujuk pada teori Nashir (2011) yang menyatakan bahwa ada tiga pendekatan yang harus dilakukan. Yang pertama, perilaku politik moderat-akomodatif, kedua perilaku politik idealis dan yang terakhir perilaku politik pragmatis.

1. Perilaku Politik Moderat-Akomodatif

Rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel ini berefek kepada perilaku politik bagi para pucuk pimpinan Muhammadiyah yang berada di level daerah masing-masing, baik di level Pimpinan Daerah Muhammadiyah maupun di level ortom-ortom setingkat daerah. Dikarenakan rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel ini, maka para Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep harus ikut menyukseskan pemilihan Calon Anggota DPD RI dengan mendukung usungan yang sudah di sepakati oleh PWM Sulsel.

Nashir (2011) menjelaskan bahwa perilaku politik moderat-akomodatif merupakan sikap politik kompromistik atau menyesuaikan diri dengan kekuasaan (pemerintah, negara) tetapi tidak dengan mengintegrasikan diri dalam kekuasaan selain terbatas pada kerjasama yang saling membutuhkan dengan tetap berpegang pada prinsip gerakan Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pangkep selaku pimpinan tertinggi yang mengkoordinir segala aktivitas organisasi Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pangkep memberikann penjelasan mengenai pemilihan Calon Anggota DPD RI 2019 :

“Dalam pemilihan Calon Anggota DPD RI lalu sebagai warga Muhammadiyah sekaligus pimpinan Muhammadiyah Pangkep, sesuai instruksi PWM Sulsel saya memerintahkan langsung agar semua unsur yang ada di Muhammadiyah Pangkep itu bersatu agar bagaimana caranya calon Anggota DPD RI ini bisa terpilih nantinya.”

(Hasil Wawancara, AMA, Ketua Umum PD Muhammadiyah Pangkep, Rabu 6 Januari 2021, Pukul 20:00 Wita di rumah pribadinya Kelurahan Mappasaile).

Penjelasan dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep mengutarakan bahwa apa yang menjadi instruksi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel secara organisasi harus dilaksanakan dan sudah menjadi kewajiban anggota organisasi untuk menaati instruksi tersebut. Hal tersebut mengartikan bahwa Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep mengintruksikan tanpa meminta pendapat atau mengakomodir terlebih dahulu pendapat para anggota organisasi yang lainnya. Sehingga keputusan yang muncul adalah keputusan berdasarkan perintah organisasi yang setingkat di atasnya tanpa melibatkan organisasi setingkat di bawahnya.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Muhammadiyah Pangkep saat peneliti mewawancarnya.

Berikut komentarnya :

Dalam pemilihan DPD kita juga harus lihat juga figurnya bagaimana, kalau tidak memiliki kemampuan, tidak kapabel, kualitasnya juga tidak ada tentu saya tidak memilih karena itu sama saja mengorbankan organisasi. Tapi sebagai orang Aisyiyah, orang Muhammadiyah saya yakin orang yang diusung adalah orang yang memenuhi syarat untuk dicalonkan”

(Hasil Wawancara, SHF, Ketua Umum PD Aisyiyah Pangkep, Senin 25 Januari 2021, Pukul 20:00 di rumah pribadinya Jl. Penghibur Kelurahan Mappasaile).

Menganalisis hasil wawancara dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Pangkep, beliau menjelaskan bahwa dalam menentukan pilihan perlu ada pertimbangan terlebih dahulu. Calon Anggota DPD RI harus memiliki kualitas yang baik agar bisa dipilih sehingga pemilih yakin untuk memilihnya. Namun Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Pangkep tetap mengikuti

hasil rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, menurutnya orang yang diusung oleh Muhammadiyah adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk dipilih.

Hampir senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Pangkep, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pangkep menaympaikan bahwa dalam menentukan pilihannya pada saat pemilihan Calon Anggota DPD RI yang lalu, beliau juga memiliki pertimbangan.

Komentarnya seperti berikut :

“Sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pangkep saya juga tetap megindahkan instruksi dari Ayahanda Ketua PDM Pangkep. Namun dalam pemilihan ini secara pribadi saya juga harus tetap melihat faktor-faktor yang lain sebelum memilih terutama pandangan-pandangan internal organisasi. Secara pribadi saya memiliki kedekatan emosional dengan calon jadi ini salah satu yang menyebabkan saya juga mengikuti arahan dari ayahanda kita”

(Hasil Wawancara, AKH, Ketua Umum PD Pemuda Muhammadiyah Pangkep, Rabu 16 Desember 2020, Pukul 20:00 Wita di Kantor Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Mattoangin Kelurahan Mappasaile).

Menganalisis hasil wawancara diatas Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pangkep menjelaskan bahwa dirinya tetap mengikuti instruksi Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep sesuai yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel. Tapi menurut penjelasan beliau, dia juga tetap harus memperhatikan beberapa faktor sebelum menjatuhkan pilihannya secara *final* karena merasa memerlukan juga pandangan -pandangan dari internal organisasinya. Namun kecenderungannya secara pribadi tetap mengikuti arahan dari Ketua Umum Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Pangkep dengan alasan memiliki ikatan emosional dengan Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan.

Informan lebih lanjut menyampaikan bahwa di internal organisasinya dia tidak serta merta langsung menginstruksikan untuk memilih salah satu Calon Anggota DPD RI namun terlebih dahulu membicarakan dengan anggota-anggota organisasi. Berikut komentarnya :

“Sewaktu Pemilu 2019 yang lalu kami mengakomodir pendapat-pendapat dari berbagai pihak khususnya internal NA Pangkep dan eksternal dalam hal ini Ayahanda PDM meskipun sama-sama dalam persyarikatan. Sehingga keputusan akhirnya tetap dikembalikan kepada organisasi. Apa yang telah menjadi keputusan organisasi itulah yang kami laksanakan. Namun secara pribadi saya mendukung Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan Ayahanda karena sesuai dengan visi misi organisasi”

(Hasil Wawancara, ST, Ketua Umum PD Naisiyatul Aisyiyah Pangkep, Rabu 28 Juli 2020, Pukul 20:00 Wita di Rumah Pribadi, Perumahan Depag Kelurahan Tumampua).

Hal yang kurang lebih senada dengan Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pangkep, informan selanjutnya menyampaikan bahwa dirinya mengakomodir terlebih dahulu pendapat-pendapat internal organisasi sebelum mengambil keputusan. Informan memberikan komentarnya seperti berikut :

“Selaku ketua umum saya sudah menyampaikan kepada semua anggota organisasi IPM Pangkep bahwa ada instruksi dari Ayahanda PDM untuk memilih salah satu Calon Anggota DPD RI. Saat itu kami terlebih dahulu bermusyawarah secara internal karena saya harus menerima semua masukan pimpinan dan akhirnya sepakat untuk mendukung karena latar belakangnya sama dengan organisasi kami”

(Hasil Wawancara, MR, Ketua Umum PD IPM Pangkep, Selasa 27 Juli 2020, Pukul 09.00 Wita di Kantor Lazismu Pangkep, Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Paddoangdoangan).

Kemudian informan berikutnya yang juga salah satu ketua organisasi otonom Muhammadiyah memberikan komentar seperti berikut :

Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep pada saat itu menginstruksikan agar seluruh elemen Persyarikatan Muhammadiyah Pangkep baik organisasi otonom maupun warga persyarikatan itu sendiri untuk mendukung salah satu Calon Anggota DPD RI berdasarkan rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel. Berdasarkan hal tersebut, selaku Ketua Umum PC IMM Pangkep memerintahkan untuk bermusyawarah terlebih dahulu agar saya memutuskan tidak secara sepihak dan anggota-anggota sepakat untuk memilih Calon yang direkomendasikan oleh Ayahanda PWM Sulsel”

(Hasil Wawancara AA Ketua Umum PC IMM Pangkep, Kamis 31 Desember 2020 Pukul 09.00 Wita di Secret Cofee Kelurahan Paddoangdoangan).

Berdasarkan komentar Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pangkep, langkah yang dilakukan setelah adanya arahan untuk memilih salah satu Calon Anggota DPD RI yang diusung oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel adalah merundingkan terlebih dahulu, beliau tidak langsung memutuskan pilihannya tapi terlebih dahulu meminta pendapat-pendapat para anggota di internal organisasi.

Salah seorang informan yang merupakan warga Muhammadiyah Pangkep memberikan komentarnya saat peneliti mengajukan pertanyaan tentang apakah ada instruksi langsung dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep untuk memilih salah satu Calon Anggota DPD RI, Berikut komentrar informan :

“Kami semua diperintahkan untuk memilih Calon Anggota DPD yang diinstruksikan oleh ayahanda karena hal tersebut merupakan rekomendasi dari PWM Sulsel. Saya juga baru kali ini mendapati kalau ayahanda mengarahkan secara organisasi untuk memilih Calon Anggota DPD tertentu.”

(Hasil Wawancara MA, Warga Muhammadiyah Kecamatan Pangkajene, Selasa 6 April 2021 Pukul 16.00 Wita di Jl. Jenderal Sukowati Kelurahan Paddoangdoangan Kecamatan Pangkajene).

Kurang lebih senada dengan informan di atas, Warga Muhammadiyah berikutnya juga memberikan komentarnya terkait DPD RI 2019. Komentarnya seperti berikut :

“Pada saat itu memang semua Pimpinan Daerah mengarahkan untuk memilih Pak Syaiful Saleh. Hal tersebut berdasarkan keputusan PWM Sulsel jadi kita sebagai warga Muhammadiyah harus ikut keputusan di atas.”

(Hasil Wawancara AA, Warga Muhammadiyah Kecamatan Labakkang, Selasa 6 April 2021 Pukul 18.00 Wita di Jl. Jenderal Sukowati Kelurahan Paddoangdoangan Kecamatan Pangkajene).

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informas di atas, elit struktural Muhammadiyah memang menginnstruksikan semua elemen Muhammadiyah Pangkep baik warga maupun Pimpinan harus melaksanakan rekomedasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.

Informan berikutnya yang merupakan Komisioner KPUD Kabupaten Pangkep memberikan penjelasan bahwa ormas seperti Muhammadiyah tentu memiliki kader yang potensial untuk ikut bertarung dalam ajang Pemilu 2019.

Berikut komentarnya :

“Terkait DPD RI Muhammadiyah bisa mengambil bagian melalui kader-kadernya yang potensial, melalui mekanisme yang ada tanpa membawa nama organisasi kadernya bisa mengikuti Pemilu. Bukan itu saja ada banyak kader-kader Muhammadiyah yang juga sebagai penyelenggara misal sebagai KPPS. Hal ini merupakan bagian dari partisipasi politik

bukan hanya sebagai tim pemenangan namun juga sebagai penyelenggara pemilu.”.

(Hasil Wawancara RR Komisioner KPUD Pangkep di Kantor KPUD Pangkep, Selasa 29 Desember 2020, Pukul 13.00 Wita).

Tanggapan berikutnya yakni dari Badan Pengawas Pemilu Pangkep yang mengemukakan Muhammadiyah Pangkep cenderung moderat dikarenakan adanya kader-kader Muhammadiyah Pangkep yang turut mengambil bagian sebagai anggota di Badan Pengawas Pemilu. Komentarnya sebagai berikut :

“Saya melihat kader-kader Muhammadiyah di Pangkep ini bukan saja tampil sebagai peserta pemilu dan tim sukses tapi mereka juga tampil sebagai pengawas pemilu. Bisa kita lihat ada beberapa yang jadi Panwascam mereka semua adalah kader Muhammadiyah”.

(Hasil Wawancara MR Komisioner KPUD Pangkep di Perumahan Jagong Residence Kelurahan Jagong, 25 Januari 2020, Pukul 11.00 Wita)

Menanggapi hasil wawancara di atas yakni dari Badan Pengawas Pemilu Pangkep dan KPUD Pangkep peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan terlibatnya kader-kader Muhammadiyah baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pengawas, menunjukkan bahwa adanya moderasi dalam proses Pemilu 2019.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa perilaku politik yang ditunjukkan oleh masing-masing elit struktural Muhammadiyah Pangkep cenderung kepada perilaku politik yang moderat dan mengakomodir pendapat-pendapat dari pihak lain tanpa memperlihatkan fanatisme yang berlebihan, terkecuali Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pangkep. Ketua Umum Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Pangkep yang cenderung mengambil keputusan satu komando dari pimpinan yang lebih tinggi dari struktural diatasnya sehingga tidak perlu lagi mengambil keputusan untuk bermusyawarah dengan pihak yang lainnya, baik organisasi otonom maupun anggota-anggota Muhammadiyah Pangkep yang lainnya. Kemudian Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pangkep yang memilih karena adanya kedekatan emosional dengan Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.

2. Perilaku Politik Idealis

Perilaku politik idealis yaitu perilaku politik yang cenderung menarik garis batas dengan kekuasaan dan sampai batas tertentu menunjukkan sikap oposisi atau radikal terhadap kekuasaan. Informan pertama memberikan komentarnya mengenai keterlibatannya dalam pemilihan DPD RI yang lalu. Berikut komentarnya :

“Sebagai warga Muhammadiyah harus mendukung total keputusan PWM Sulsel. Jadi tidak diperkenankan lagi ada jarak dengan Calon Anggota DPD RI karena sudah ada perintah dari PWM Sulsel. Secara emosional saya juga dekat dengan Pak Saiful Saleh karena sebelum mencalonkan beliau juga selalu bersilaturahmi. Saya akrab betul bahkan beliau seringkali datang ke rumah.”

(Hasil Wawancara, AMA, Ketua Umum PD Muhammadiyah Pangkep, Rabu 6 Januari 2021, Pukul 20:00 di rumah pribadinya Jl. Ketimun Kelurahan Mappasaile).

Menganalisis hasil wawancara dari Ketua Umum PD Muhammadiyah Pangkep bahwa dirinya mendukung total Calon Anggota DPD RI yang sudah direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel. Secara pribadi juga beliau tidak ada alasan untuk tidak mendukung Calon DPD RI

yang diusung oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel dikarenakan sudah menjalin keakraban dengan calon Anggota DPD RI sebelumnya. Sehingga organisasi otonom Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pangkep tentunya juga harus mendukung Calon Anggota DPD RI tidak ada independensi organisasi. Semua harus sesuai dengan intruksi Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh informan selanjutnya saat peneliti mewawancarainya. Berikut komentarnya :

“Dalam pemilihan DPD RI yang lalu, anggota-anggota tetap saya instruksikan untuk memilih calon DPD RI yang telah disepakati oleh PWM Sulsel. Tapi secara pribadi saya tetap menjaga jarak dengan Calon dikarenakan tidak mau terlalu nampak. Saya cukup bergerak di balik layar”.

(Hasil Wawancara, SHF, Ketua Umum PD Aisyiyah Pangkep, Senin 25 Januari 2021, Pukul 20:00 di rumah pribadinya Jalan Penghibur Kelurahan Mappasaile).

Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Pangkep bahwa meskipun mengikuti dan melaksanakan hasil rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, dirinya tetap menjaga batas-batas tertentu dari Calon yang diusung dikarenakan tidak ingin diketahui oleh publik.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Pangkep, informan berikut ini juga menyampaikan hal yang kurang lebih senada mengenai keterlibatannya dalam Pemilu 2019 lalu, informan berikut tetap mengikuti instruksi dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep. Komentarnya seperti berikut :

“Tujuan dari demokrasi bagaimana kemudian pemimpin itu mempunyai visi dan misi untuk kemaslahatan orang banyak adapun kepentingan pribadi itu adalah hal ke dua. Oleh karenanya saya secara pribadi mengedepankan kepentingan umum terlebih dahulu dibanding kepentingan pribadi. Jangan sampai hanya karena saya mempunyai kepentingan karena punya kedekatan emosional dengan calon akhirnya saya memilih calon tersebut tapi ternyata kepentingan-kepentingan anggota saya tidak terakomodir. Tapi dengan berbagai pertimbangan saya pikir keputusan Ayahanda Ketua PDM sudah tepat”

(Hasil Wawancara, AKH, Ketua Umum PD Pemuda Muhammadiyah Pangkep, Rabu 16 Desember 2020, Pukul 20:00 Wita di Kantor Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Mattoangin Kelurahan Mappasaile).

Tanggapan di atas menerangkan bahwa sisi idealisme Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pangkep cenderung kurang dikarenakan tidak ada sikap penolakan meskipun keputusan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pangkep tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan organisasi yang dipimpinnya..

Ketua Umum Pimpinan Daerah Nasyiyatul Aisyiyah Pangkep sebagai informan selanjutnya menerangkan bahwa pentingnya memilih Calon Anggota DPD RI yang sesuai dengan visi misi organisasi terlepas daripada adanya hubungan khusus dengan Calon Anggota DPD RI. Berikut komentarnya :

“Baik secara pribadi maupun kelembagaan, saya tidak pernah menjalin hubungan khusus dengan Calon Anggota DPD RI. Namun ketika kita melihat visi dan misi Calon tersebut itu sesuai dengan apa yang kami cita-citakan di organisasi jadi menurut saya Calon tersebut pantas untuk dipilih. Tapi saya tetap kembalikan kepada internal organisasi untuk penentuannya sebagai keputusan bersama.

(Hasil Wawancara, ST, Ketua Umum PD Naisyiyatul Aisyiyah Pangkep, Rabu 28 Juli 2020, Pukul 20:00 Wita di Rumah Pribadi, Perumahan Depag Kelurahan Tumampua).

Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pangkep memberikan tanggapannya saat peneliti menanyakan tentang kedekatannya dengan Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel. Komentar informan seperti berikut :

“Saya sangat menjaga jarak dengan Calon Anggota DPD RI tersebut agar tercipta independensi organisasi karena di organisasi kami juga merasa punya hak tersendiri untuk menentukan sebuah pilihan. Secara pribadi pun saya tidak pernah ketemu dengan Calon Anggota DPD pada waktu itu. Tapi kalau ada pengurus yang terjun dalam kampanye atau hal-hal lain dalam politik saya tidak melarang asal atribut organisasi itu tidak diikuti sertakan.”

(Hasil Wawancara, MR, Ketua Umum PD IPM Pangkep, Selasa 27 Juli 2020, Pukul 09.00 Wita di Kantor Lazismu Pangkep, Jl. Jend. Sukowati Kelurahan Paddoangdoangan).

Penyampaian informan lebih lanjut, yakni Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pangkep cenderung tidak ada sikap penolakan terhadap instruksi Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep . Beliau menjelaskan seperti berikut :

“Sebagai warga Muhammadiyah sekaligus Ketua Umum PC IMM Pangkep juga saya harus menimbang-nimbang terlebih dahulu siapa yang akan dipilih namun karena sudah ada instruksi dari Ayahanda saya sebagai warga persyarikatan tentu sudah yakin apa yang telah menjadi keputusan pimpinan kami diatas. Sehingga saya ikut keputusan organisasi apalagi orang yang direkomendasikan adalah orang dari Muhammadiyah itu sendiri.”

(Hasil Wawancara AA Ketua Umum PC IMM Pangkep, Kamis 31 Desember 2020 Pukul 09.00 Wita di Secret Cofee Kelurahan Paddoangdoangan).

Informan selanjutnya, yakni Warga Muhammadiyah memberikan komentarnya terkait keterlibatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam pemilihan DPD RI 2019. Informan menjelaskan seperti berikut :

“Salah seorang Ketua Ortom pada saat itu mengajak saya untuk ikut menjadi bagian dari tim pemenangan tapi saya menolak karena ingin fokus studi saja. Hal tersebut menurut saya ada baiknya karena yang ingin dimenangkan adalah orang kita sendiri. Dan juga untuk petinggi-petinggi Muhammadiyah yang lain cenderung hanya bergerak di balik layar”

(Hasil Wawancara MA, Warga Muhammadiyah Kecamatan Pangkajene, Selasa 6 April 2021 Pukul 16.00 Wita di Jl. Jenderal Sukowati Kelurahan Paddoangdoangan Kecamatan Pangkajene).

Kurang lebih senada dengan informan di atas, Warga Muhammadiyah berikutnya juga memberikan komentarnya terkait keterlibatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep dalam pemilihan Calon Anggota DPD RI 2019. Komentarnya seperti berikut :

“Pada saat itu yang saya lihat tidak semua petinggi-petinggi menjadi tim pemenangan, pada saat itu cuma ketua Pemuda Muhammadiyah Pangkep yang menjadi bagian dari tim pemenangan. Barangkali karena ayahanda dan ibunda yang memilih tidak terlibat lebih menjaga diri karena ada setahu saya ada yang PNS dan menjabat di pemerintahan daerah. Tapi mereka tetap mengarahkan kami untuk memilih calon yang direkomendasikan”

(Hasil Wawancara AA, Warga Muhammadiyah Kecamatan Labakkang, Selasa 6 April 2021 Pukul 18.00 Wita di Jl. Jenderal Sukowati Kelurahan Paddoangdoangan Kecamatan Pangkajene).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas, perilaku politik yang ditunjukkan oleh elit struktural Muhammadiyah Pangkep cenderung tidak terlibat secara praktis namun dalam keadaan dan waktu tertentu tetap mengkampanyekan Calon Anggota DPD RI yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.

Komisioner KPUD Pangkep menjelaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh kader-kader Muhammadiyah itu sendiri sudah ideal karena tidak ada satupun berkas yang masuk di KPUD Pangkep mengatasnamakan organisasi. Berikut komentar komisioner tersebut :

“Ormas seperti Muhammadiyah pada saat Pemilu 2019 saya pikir sudah melakukan langkah yang pas karena dalam keterlibatannya tidak mencatut nama organisasi. Dalam aturan pun tidak ada larangan kader-kader Muhammadiyah termasuk petinggi-petingginya selama bukan ASN silahkan ambil bagian dalam proses demokrasi. Kemudian saya lihat petinggi-petinggi Muhammadiyah yang dimaksud itu tidak ada yang terdaftar sebagai tim pemenang”.

(Hasil Wawancara RR Komisioner KPUD Pangkep di Kantor KPUD Pangkep, Selasa 29 Desember 2020, Pukul 13.00 Wita).

Senada yang disampaikan oleh Komisioner KPUD Pangkep bahwa dalam aturan tidak ada larangan apabila kader-kader Muhammadiyah baik ketua-ketua organisasi maupun anggotanya mengambil bagian dalam Pemilu 2019 selama memenuhi persyaratan dan sesuai kaidah organisasi. Komentar informan seperti berikut :

“Saya kira tidak ada masalah apabila kader-kader Muhammadiyah berpartisipasi di politik, selama orang tersebut memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku sah-sah saja. Untuk melegalkan kedudukannya siapa lagi yang legalkan kalau bukan orang-orang Muhammadiyah itu sendiri. Apalagi ormas seperti Muhammadiyah punya tujuan organisasi yang mementingkan kemaslahatan ummat dan apabila kader-kadernya mengambil bagian pasti juga kebijakan yang dihasilkan adalah untuk kemaslahatan ummat karena sudah dibekali di organisasi”.

(Hasil Wawancara MR Komisioner KPUD Pangkep di Perumahan Jagong Residence Kelurahan Jagong, 25 Januari 2020, Pukul 11.00 Wita)

Tanggapan informan di atas mengartikan bahwa organisasi yang besar seperti Muhammadiyah Idealnya harus melibatkan kader-kadernya selagi

memenuhi persyaratan untuk dicalonkan. Hal tersebut dapat memudahkan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah itu sendiri apabila kadernya mendapatkan kedudukan yang legal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa kecenderungan untuk bersikap idealis oleh masing-masing elit struktural Muhammadiyah Pangkep sangat minim dikarenakan masing-masing masih mengikuti instruksi Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep. Tidak adanya sikap penolakan oleh masing-masing ketua organisasi menunjukkan bahwa mereka masih meyakini bahwa apa yang diinstruksikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkep sudah tepat. Namun keputusan yang diambil tetap harus dikembalikan terlebih dahulu ke internal masing-masing organisasi agar keputusan yang lahir bukan keputusan sepihak.

3. Perilaku Politik Pragmatis

Perilaku Politik yang ketiga menurut Nashir (2011) yaitu perilaku politik pragmatis dimana perilaku yang ditunjukkan cenderung mengintegrasikan diri dalam kekuasaan dan meninggalkan label ideologi Muhammadiyah. Perilaku politik ini lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Jika tidak ada manfaat untuk diri sendiri maka tidak ada keterlibatan dan biasanya orang yang pragmatis cenderung tidak memperhatikan independensi lembaga sehingga terjun langsung dalam proses politik.

Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah menyampaikan bahwa dirinya kadang ikut serta ketika Calon Anggota DPD RI melaksanakan kampanye karena merasa ada kedekatan emosional dengan Calon Anggota DPD RI tersebut.

(Hasil Wawancara, SHF, Ketua Umum PD Aisyiyah Pangkep, Senin 25 Januari 2021, Pukul 20:00 Wita di rumah pribadinya Jalan Penghibur Kelurahan Mappasaile).

Tanggapan dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Pangkep menjelaskan akan posisinya sebagai Ketua Yayasan sehingga tidak terlibat secara praktis dalam proses politik. Namun sebagai bentuk keta'atan terhadap rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, beliau tetap menjalankannya meskipun harus bergerak di belakang layar.

Penjelasan yang senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Nasyiyatul Aisyiyah Pangkep. Berikut komentarnya :

“Secara pribadi maupun kelembagaan, saya menjaga jarak dengan para calon karena kapasitas saya juga tidak bisa terlepas sebagai aparatur sipil negara. Namanya ASN pasti dilarang terlibat politik praktis sehingga saya harus tetap jaga jarak demi menjaga diri dari pelanggaran. Tapi karena ada tanggung jawab organisasi kami tetap mendukung Calon yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel. Di internal NA Pangkep juga telah bersepakat untuk mendukung calon tersebut.

(Hasil Wawancara, ST, Ketua Umum PD Nasyiyatul Aisyiyah Pangkep, Rabu 28 Juli 2020, Pukul 20:00 Wita di Rumah Pribadi, Perumahan Depag Kelurahan Tumampua).

Informan berikutnya memberikan penjelasan yang sedikit berbeda bahwa dirinya terlibat aktif dalam pemilihan Calon Anggota DPD RI. Statusnya sebagai ketua organisasi otonom dan tidak adanya aturan yang mengikat secara pribadi membuat dirinya terjun langsung dan meleburkan diri dalam suksesi pemilihan DPD RI. Komentar informan sebagai berikut :

“Jadi setelah saya berembuk dengan anggota-anggota di internal organisasi Pemuda Muhammadiyah secara kelembagaan pun kami mendukung Calon yang direkomendasikan oleh PWM Sulsel. Waktu itu saya juga terlibat langsung sebagai tim pemenang karena secara background saya memiliki kedekatan emosional dengan calon, saya pun

instruksi dari Ayahanda saya sebagai warga persyarikatan tentu sudah yakin apa yang telah menjadi keputusan pimpinan kami diatas. Sehingga saya ikut keputusan organisasi apalagi orang yang direkomendasikan adalah orang dari Muhammadiyah itu sendiri.”

(Hasil Wawancara AA Ketua Umum PC IMM Pangkep, Kamis 31 Desember 2020 Pukul 09.00 Wita di Secret Cofee Kelurahan Paddoangdoangan).

Kurang lebih senada dengan informan di atas, Warga Muhammadiyah berikutnya juga memberikan komentarnya terkait pemilihan Calon Anggota DPD RI 2019. Komentarnya seperti berikut :

“Saya juga tidak terlibat secara praktis dalam Pemilu 2019 yang lalu karena itu yang saya katakan tadi, saya lebih memilih fokus studi. Pada saat itu memang yang saya lihat ayahanda Ketua PDM maupun ibunda Ketua Aisiyiah tidak nampak seara publik dalam berkampanye. Hanya ketua pemuda pada saat itu yang terang-terangan berakampanye karena dia juga merupakan tim pemenangan”

(Hasil Wawancara MA, Warga Muhammadiyah Kecamatan Pangkajene, Selasa 6 April 2021 Pukul 16.00 Wita di Jl. Jenderal Sukowati Kelurahan Paddoangdoangan Kecamatan Pangkajene).

Informan berikutnya yang juga merupakan warga Muhammadiyah Pangkep menjelaskan bahwa keterlibatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam Pemilu 2019 yang lalu tidak bersifat pragmatis. Berikut penjelasannya :

“Terus terang memang ayahanda dan ibunda tidak terlibat secara langsung. Tapi mereka di balik layar tetap mengarahkan kami untuk memilih Syaiful Saleh. Jadi pada saat itu saya berpendapat kalau ayahanda dan ibunda tidak terlibat secara praktis karena tidak terjun langsung berkampanye”

(Hasil Wawancara AA, Warga Muhammadiyah Kecamatan Labakkang, Selasa 6 April 2021 Pukul 18.00 Wita di Jl. Jenderal Sukowati Kelurahan Paddoangdoangan Kecamatan Pangkajene).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas, perilaku politik yang ditunjukkan oleh elit struktural Muhammadiyah Pangkep cenderung berkampanye di balik layar dan tidak terlibat secara langsung namun dalam

Informan berikutnya yang juga salah satu perangkat Pemilu 2019 memberikan komentarnya pada saat peneliti mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana keterlibatan Muhammadiyah secara praktis. Komentarnya seperti berikut :

“Pada saat pelaksanaan Pemilu 2019, secara kelembagaan Muhammadiyah tidak pernah berkonsultasi namun atas nama perseorangan yakni orang Muhammadiyah itu pernah berkonsultasi. Kami pada saat itu menyampaikan batasan-batasan dan point-point pelanggaran kampanye. Keterlibatan dalam politik praktis Pemimpin-pemimpin Muhammadiyah Pangkep baik secara administratif maupun dan nampak pada saat itu tidak ada yang kami dapati. Bahkan di bawah Bawaslu justru orang-orang Muhammadiyah banyak yang menjadi anggota”.

(Hasil Wawancara MR. Komisioner KPUD Pangkep di Perumahan Jagong Residence Kelurahan Jagong, 25 Januari 2020, Pukul 11.00 Wita)

Tanggapan dari informan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perilaku politik elit-elit struktural Muhammadiyah pada saat Pemilu 2019 tidak ada sama sekali keterlibatan secara praktis namun kader-kader Muhammadiyah itu sendiri terlibat secara praktis. Bisa kita lihat dari hasil wawancara informan dari KPUD Pangkep yang menyatakan bahwa ada atas nama perseorangan yang berlatar belakang dari Muhammadiyah yang memasukkan berkas ke KPUD Pangkep. Kemudian yang kedua, adanya kader-kader Muhammadiyah yang berkonsultasi dengan Bawaslu Pangkep tentang batasan-batasan selama proses kampanye.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan peneliti berkesimpulan bahwa apa yang peneliti temui di lapangan memiliki kecenderungan yang sama dengan Teori yang disampaikan oleh Haedar Nashir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perilaku politik yang ditunjukkan oleh para elit-elit struktural Muhammadiyah cenderung mengarah kepada perilaku politik moderat-akomodatif. Para elit struktural Muhammadiyah dan ortom-ortom Muhammadiyah itu sendiri secara pribadi telah bersepakat untuk mendukung salah satu Calon Anggota DPD RI Periode 2019-2024. Meski masing-masing elit struktural organisasi sudah mengajak seluruh anggotanya untuk memilih Calon Anggota DPD RI yang telah disepakati, tapi masing-masing elit struktural organisasi tetap memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dan mengakomodir pendapat-pendapat anggotanya.
2. Pada tahap pelaksanaan kampanye, tidak adanya atribut-atribut organisasi yang nampak dengan metode kampanye yang hanya bergerak di balik layar menandakan bahwa masing-masing elit struktural organisasi masih menjaga marwah organisasi dan menghindari menyatakan dukungan secara publik karena adanya elit struktural organisasi yang masih terikat dengan aturan-aturan dimana mereka bekerja. Hal ini mengartikan bahwa masing-masing elit struktural organisasi menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi dengan memperhatikan prinsip-prinsip organisasi.

- Jurdi, Syarifuddin (2010). *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Makkulau, M Farid W, 2008, *Sejarah kekaraengan di Pangkep Makassar* : Pustaka Refleksi,
- Maliki, Zainuddin. (2005a). *Islam Varian Rasio dalam Diskursus Cendikiawan*, cetakan pertama Juni 2005. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)
- MPK, (2010). *Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah dan Langkah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Mulkhan, Abdul Munir (1989). *Perubahan Pola Perilaku dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*. Rajawali Press. Jakarta
- Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai gerakan Islam* : dalam perspektif Historis dan Ideologis, (Yogyakarta: LPPI, 2000)
- Nakamura, Mitsou, 1983, *Bulan Sabit Muncul Dari Balik Pohon Beringin*, Terjemahan Yogyakarta, Gadjah Mada University-Press
- Nashir, Haedar (2011). *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Puslitban. Jakarta
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken. 2007. "Pendahuluan" dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (et.al), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nursyam. 2009. *Mazhab-mazhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS.
- Pasha, Musthafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam :Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2000.
- Paul Hersey dan Kennerg H. Blanchard, *Manajemen Perilaku Organisasi Pendayagunaan Sumber daya Manusia*, pen. Agus Dharma (Jakarta: Erlangga: 1982) hal. 98
- Peacock, James L., 1986, *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, Jakarta, Cipta Kreatif.